



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN WAJO**



RENCANA KERJA (Renja)



Jln. Kejaksaan No. 5 B Sengkang



Telp. (0485) 21021 Fax. (0485) 21021



<http://bkpsdm.wajokab.go.id>

**TAHUN
2019**



**BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI WAJO
NOMOR 97/TAHUN 2018
TENTANG**

**PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN WAJO TAHUN 2019**

BUPATI WAJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Perubahan RPJMD) Kabupaten Wajo Tahun 2014-2019 dengan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2014-2019, perlu adanya verifikasi rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 guna memperoleh pengesahan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

12. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
23. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
24. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011

- tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah ;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
 31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9);
 32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2);
 33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7);

34. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 - 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015, Nomor 9);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 1);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wajo Tahun 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2012 Nomor 66);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 14 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2014 Nomor 13);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2015 Nomor 10);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 62);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Wajo Tahun 2005 - 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Wajo Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2016);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wajo Tahun 2014 - 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Tahun 2017 Nomor 20);

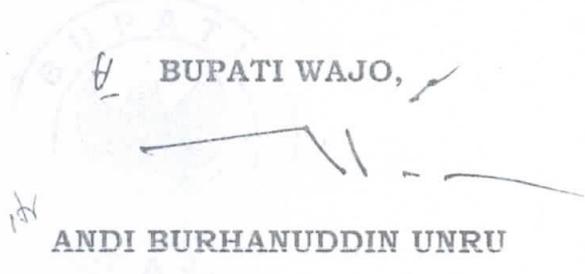
42. Peraturan Bupati Kabupaten Wajo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2018 Nomor).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengesahkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** menjadi pedoman dan/atau acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA setiap Perangkat Daerah Tahun 2018.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 4 DESEMBER 2018

 **BUPATI WAJO,**

ANDI BURHANUDDIN UNRU


ANDI CHALIDHI S.H.
NIP. 19510201 198903 2 005

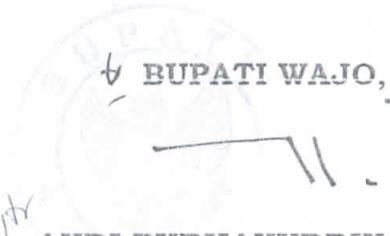
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAJO
NOMOR 874 TAHUN 2018
TENTANG
PENGESAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN WAJO
TAHUN 2014-2019

**HASIL KESIMPULAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP
KEBIJAKAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH**

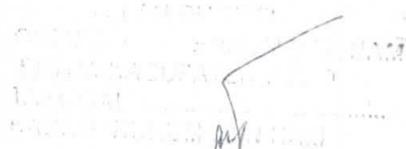
- A. Sesuai ketentuan Pasal 139 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, menyatakan bahwa rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah diverifikasi akhir oleh Bappeda untuk memperoleh pengesahan. Adapun Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi akhir sebagai berikut :
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 2. Dinas Kesehatan
 3. RSUD Lamaddukelleng
 4. RSUD Siwa
 5. Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Jasa Konstruksi dan Penataan Ruang
 6. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
 7. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
 8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 9. Badan Penelitian dan Pengembangan
 10. Dinas Perhubungan
 11. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
 12. Dinas Lingkungan Hidup
 13. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
 14. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 15. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 16. Dinas Sosial
 17. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 18. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 19. Dinas Pemuda dan Olah Raga
 20. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 21. Sekretariat Daerah
 22. Sekretariat DPRD
 23. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
 24. Inspektorat Daerah
 25. Badan Pendapatan Daerah
 26. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 27. Satuan Polisi Pamong Praja
 28. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 29. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 30. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
 31. Dinas Ketahanan Pangan
 32. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 33. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

34. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
35. Dinas Perkebunan
36. Dinas Perikanan
37. Dinas Perdagangan
38. Dinas Perindustrian
39. Dinas Pariwisata
40. Kecamatan Tempe
41. Kecamatan Sabbangparu
42. Kecamatan Pammana
43. Kecamatan Bola
44. Kecamatan Takkalalla
45. Kecamatan Sajoanging
46. Kecamatan Majauleng
47. Kecamatan Tanasitolo
48. Kecamatan Belawa
49. Kecamatan Maniangpajo
50. Kecamatan Keera
51. Kecamatan Pitumpanua
52. Kecamatan Penrang
53. Kecamatan Gilireng

B. Bahwa visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah telah berkesesuaian dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2014-2019.


BUPATI WAJO,

ANDI BURHANUDDIN UNRU



ANDI BURHANUDDIN UNRU
N.P. 71313291 196903 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Kejaksaan Nomor 5 B Telp. (0485) 21021 Fax. (0485) 21021
Website : <http://bkpsdm.wajokab.go.id> Email : bkpsdm@wajokab.go.id / bkpsdm.wajokab@gmail.com, Sengkang 90911

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN WAJO

3957.1

NOMOR : 800.1/3957.1/TAHUN 2018

TENTANG
RENCANA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN WAJO TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN WAJO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, maka perlu menyusun perencanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo tentang Rencana Kerja Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29);

8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Wajo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2016);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wajo Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 20 Tahun 2017);
10. Peraturan Bupati Wajo Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo;
11. Keputusan Bupati Wajo Nomor 285 Tahun 2018 tentang Pengesahan Revisi Rencana Strategis Organisasi Kerja Perangkat Daerah (Renstra OPD) Kabupaten Wajo;
12. Keputusan Bupati Wajo Nomor 974 Tahun 2018 tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo Tahun 2019.
- KEDUA** : Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi pedoman dan/atau acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sengkang
Pada Tanggal : 4 Desember 2018


**PIK KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**
H. AMIRUDDIN. A, S.Sos.,M.M.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 197305141993031005

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Wajo (sebagai laporan), di Sengkang;
2. Peringgal.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas tersusunnya dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo Tahun 2019. Dokumen ini merupakan uraian perencanaan bagi BKPSDM Kabupaten Wajo Tahun 2019 yang selanjutnya menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai Urusan Pemerintahan Penunjang pada Pemerintah Kabupaten Wajo. Penyusunan dokumen Renja BKPSDM Kabupaten Wajo Tahun 2019 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta tetap memperhatikan Rencana Strategis BKPSDM Kabupaten Wajo Tahun 2014-2019.

Dokumen Renja ini diharapkan menjadi pedoman bagi para pemangku kepentingan lingkup BKPSDM Kabupaten Wajo, agar meningkatkan pola kinerja melalui konsep perbaikan secara berkelanjutan (*continuously improvement*). Semoga kerja keras dan pengabdian kami bermanfaat dalam Pembangunan Kabupaten Wajo.

Sengkang, 4 Desember 2018

PL. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN WAJO,



H. AMIRUDDIN A., S. Sos, M.M

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19730514 199303 1 005



DAFTAR ISI

| | |
|--|-------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | I-1 |
| 1.1. Latar Belakang | I-1 |
| 1.2. Landasan Hukum..... | I-2 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan | I-3 |
| 1.4. Sistematika Penulisan | I-4 |
| BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2017 | II-1 |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan Capaian Revisi Renstra | II-1 |
| 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan | II-16 |
| 2.3. Isu-isu Penting Pelayanan Tugas dan Fungsi | II-20 |
| 2.4. Review Rancangan Awal RKPD | II-27 |
| 2.5. Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat | II-41 |
| BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN | III-1 |
| 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional..... | III-1 |
| 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja | III-1 |
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN | IV-1 |
| 4.1. Program dan Kegiatan | IV-1 |
| 4.2. Sumber Pendanaan | IV-1 |
| BAB V PENUTUP | V-1 |
| 5.1. Catatan Penting | V-1 |
| 5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan | V-1 |
| 5.3. Rencana Tindak Lanjut | V-1 |



DAFTAR TABEL

| | | |
|-------------|--|-------|
| Tabel 2.1. | Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra Opd Sampai Dengan Tahun 2018..... | II-6 |
| Tabel 2.2. | Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD..... | II-18 |
| Tabel 2.3. | Identifikasi Permasalahan | II-28 |
| Tabel 2.4. | Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan | II-31 |
| Tabel 2.5. | Review terhadap Rancangan Awal RKPD | II-32 |
| Tabel 2.6. | Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan | II-38 |
| Tabel 2.7. | Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan | II-41 |
| Tabel 2.8. | Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat | II-42 |
| Tabel 2.9. | Pemeringkatan Prioritas Program dan Kegiatan Usulan Masyarakat dan Hasil Musrenbang Kecamatan | II-42 |
| Tabel 2.10. | Penggabungan Prioritas Masukan Masyarakat dengan Rancangan Renja OPD..... | II-43 |
| Tabel 3.1. | Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi | III-3 |
| Tabel 3.2. | Tujuan dan Sasaran | III-5 |
| Tabel 4.1. | Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD | IV-2 |



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) merupakan suatu hal penting bagi terselenggaranya manajemen kinerja yang baik. Untuk tujuan ini Renja menjadi suatu hal yang cukup kritikal yang harus menjadi pokok perhatian oleh manajemen organisasi. Sebagai bagian dari manajemen kinerja, Renja menjadi isu strategis yang perlu diperhatikan agar mengarah pada arah pelaksanaan dan pencapaian Visi dan Misi organisasi. Renja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Revisi Rencana Strategis (Revisi Renstra) yang akan dilaksanakan oleh organisasi melalui berbagai kegiatan tahunan. Renja harus diselaraskan dengan berbagai hal yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah. Dengan berdasarkan Renja yang baik, maka pelaksanaan Renstra juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya dengan lebih operasional dan melihat kemungkinan-kemungkinan untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rancangan Awal Renja Pemerintah Daerah yang akan dijadikan acuan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun ke depan. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) menyusun Renja-SKPD yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Wajo merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja BKPSDM Kabupaten Wajo merupakan terjemahan perencanaan tahunan di bidang kepegawaian, sehingga bersifat lebih operasional yang dirumuskan dalam bentuk kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan pengelolaan manajemen kepegawaian. Kebijakan perencanaan kepegawaian tersebut dirumuskan dan dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan percepatan pewujudan aparatur yang profesional, handal dan religius.

Dokumen Renja BKPSDM Kabupaten Wajo disusun berdasarkan Revisi Renstra BKPSDM Tahun 2014-2019 untuk menjamin kesesuaian antara program,



kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja. Dokumen ini juga disusun dengan berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Tahun 2017 dan hasil evaluasi hasil Renja Tahun 2018, yang bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Revisi Renstra BKPSDM Kabupaten Wajo Tahun 2014-2019.

Renja BKPSDM Kabupaten Wajo Tahun 2019 diharapkan sinkron dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Wajo sesuai dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2014-2019, serta mampu mengakomodir seluruh sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh BKPSDM Kabupaten Wajo.

1.2. Landasan Hukum

Dalam melaksanakan seluruh kegiatannya, BKPSDM Kabupaten Wajo senantiasa mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan atau landasan hukum yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kabupaten;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Renja Pembangunan Daerah Tahun 2014;



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Wajo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 20);
20. Peraturan Bupati Wajo Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo;
21. Peraturan Bupati Wajo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019;
22. Keputusan Bupati Wajo Nomor 285 Tahun 2018 tentang Pengesahan Revisi Rencana Strategis Organisasi Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA OPD) Kabupaten Wajo Tahun 2014-2019;
23. Keputusan Bupati Wajo Nomor 974 Tahun 2018 tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Dokumen Renja BKPSDM Kabupaten Wajo Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan bagi BKPSDM Kabupaten Wajo dalam menyusun program dan kegiatan satu tahun pada tahun yang akan datang;
2. Memberikan acuan bagi BKPSDM Kabupaten Wajo dalam menentukan lokasi program dan kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.
3. Memberikan acuan bagi BKPSDM Kabupaten Wajo dalam menentukan kelompok sasaran program dan kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.



1.4. Sistematika Penulisan

Renja BKPSDM Kabupaten Wajo Tahun 2019 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum penyusunan Renja BKPSDM Kabupaten Wajo Tahun 2019, yang terdiri dari latar belakang penyusunan, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan, dan sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2017

Bab ini menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan capaian revisi renstra, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM Kabupaten Wajo, Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019

Bab ini menjelaskan telaahan terhadap kebijakan-kebijakan nasional, tujuan, sasaran, program dan kegiatan SKPD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERINGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan program dan kegiatan yang sesuai dengan prioritas sasaran pembangunan Tahun 2019.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun kemungkinan ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, termasuk kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.



BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
TAHUN 2017

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan Capaian Revisi Renstra

Untuk mengetahui pelaksanaan Renja Tahun 2017, maka dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja BKPSDM Kabupaten Wajo dengan cara menghitung penilaian atas keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dimaksud mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator. Selanjutnya dilakukan evaluasi kinerja dari pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan yang telah ditetapkan oleh BKPSDM Kabupaten Wajo.

Pada tahun 2017, BKPSDM Kabupaten Wajo melaksanakan 6 program dengan 48 kegiatan. Anggaran Belanja Langsung Tahun 2017 sebesar Rp 9.451.200.000,-. Dari jumlah anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp 9.170.508.936,- dengan capaian 96,06%. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan capaian Renstra BKPSDM Kabupaten Wajo Tahun 2014-2019 dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tingkat realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan atau keluarannya dibawah 100% yakni :

- a. Program pelayanan administrasi perkantoran
Kegiatan yang tidak memenuhi target keluaran adalah kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor, dalam hal pengadaan printer yang ditargetkan sebanyak 22 unit namun hanya bisa terealisasi sebanyak 12 printer atau sebesar 55%. Termasuk pengadaan UPS yang ditargetkan sebanyak 12 unit namun hanya bisa terealisasi 7 unit atau 58%.
- b. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Kegiatan yang tidak memenuhi target keluaran yang direncanakan dalam program ini adalah pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah, dengan target sebanyak 120 orang PNS yang mengikuti kegiatan ini namun hanya terealisasi sebanyak 117 orang PNS atau 97,50%.
- c. Program pembinaan dan pengembangan aparatur
 1. Monitoring dan evaluasi pelaporan kehadiran PNS, yang ditargetkan sebanyak 6.621 orang PNS namun hanya terealisasi sebanyak 6.446 orang atau 97%;
 2. Seleksi Penerimaan Calon PNS. Hal ini disebabkan oleh karena tidak terdapat formasi CPNS yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk pemerintah daerah Kabupaten Wajo, sehingga untuk kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS tidak terlaksana pada tahun anggaran 2016.
 3. Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian LP2P. Kegiatan ini sangat dipengaruhi oleh keaktifan PNS dalam menyelesaikan LP2P, sehingga target



5.465 PNS yang menyelesaikan LP2P tepat waktu hanya terealisasi sebanyak 3.148 orang atau 58%;

4. Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian LHKPN dan LHKASN. Jumlah ASN yang ditargetkan melaporkan LHKPN tepat waktu sebanyak 132 orang namun terealisasi sebanyak 43 orang atau 33%.

Adapun program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, antara lain :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat, dengan target dan realisasi 12 bulan;
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dengan target dan realisasi 12 bulan;
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional; dengan target dan realisasi 12 bulan;
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan, dengan target dan realisasi 12 bulan;
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor, dengan target dan realisasi 12 bulan;
6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, dengan target dan realisasi 12 bulan;
7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, dengan target dan realisasi 12 bulan;
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, dengan target dan realisasi 12 bulan;
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, dengan target dan realisasi 12 bulan;
10. Penyediaan jasa administrasi kepegawaian, dengan target dan realisasi 12 bulan.

b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor, dengan target dan realisasi jumlah pengadaan perlengkapan gedung sebanyak 1 unit proyektor dan 3 unit AC;
2. Pengadaan peralatan gedung kantor, dengan realisasi 100% untuk seluruh jenis pengadaan kecuali printer dan UPS;
3. Pengadaan meubeleur, dengan target dan realisasi keluaran 20 unit meja CAT dan 20 kursi kerja;
4. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor, dengan target dan realisasi keluaran satu Gedung kantor;
5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, dengan target dan realisasi keluaran 12 bulan;
6. Rehabilitasi sedang/berat Gedung kantor, dengan target dan realisasi satu Gedung kantor.



- c. Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya, dengan target dan realisasi sebanyak 66 pasang pakaian dinas beserta perlengkapannya dan 66 pasang pakaian hari-hari tertentu.
- d. Program perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan
 1. Penyusunan Renja SKPD dengan target dan realisasi Renja sebanyak satu dokumen;
 2. Penyusunan LAKIP SKPD dengan target dan realisasi LAKIP sebanyak satu dokumen;
 3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun dengan target dan realisasi laporan keuangan akhir tahun yang telah disusun sebanyak satu laporan;
 4. Asistensi penyusunan RKA Pokok dan Perubahan, dengan target dan realisasi RKA yang diasistensi sebanyak dua dokumen.
- e. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
 1. Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah, dengan target dan realisasi PNS Daerah yang telah mengikuti Diklat PIM II sebanyak 4 orang, Diklat PIM III sebanyak 9 orang, dan Diklat PIM IV sebanyak 40 orang.
 2. Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah, dengan target dan realisasi PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional dengan predikat baik sebanyak 240 orang;
 3. Pendidikan dan pelatihan formal, dengan target dan realisasi ASN yang lulus pendidikan dan pelatihan formal dengan tepat waktu dan berpredikat baik sebanyak 14 orang;
 4. Diklat teknis manajemen ASN dengan target dan realisasi ASN yang lulus pendidikan dan pelatihan teknis manajemen ASN dengan predikat baik sebanyak 80 orang.
- f. Program pembinaan dan pengembangan aparatur
 1. Analisis kebutuhan diklat, monitoring dan evaluasi hasil diklat dengan target dan realisasi analisis kebutuhan diklat, monitoring dan evaluasi hasil diklat sebanyak dua dokumen;
 2. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat PNS dengan target dan realisasi PNS yang memperoleh kenaikan pangkat tepat waktu sebanyak 1.084 orang dan PNS yang memperoleh kenaikan gaji berkala tepat waktu sebanyak 222 orang;
 3. Seleksi promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama dan administrator dengan target dan realisasi keluaran sebanyak 2 kali penyelenggaraan;
 4. Pengambilan sumpah jabatan/ pelantikan pejabat JPT, administrator dan pengawas dengan target dan realisasi 11 kali kegiatan;
 5. Penyusunan formasi dan pengolahan e-formasi ASN dengan target dan realisasi sebanyak satu dokumen;



6. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja PNS dengan target dan realisasi keluaran sebanyak 6.446 orang;
7. Asistensi dan fasilitasi penyusunan SKP dengan target dan realisasi keluaran sebanyak 6.621 orang;
8. Asistensi dan fasilitasi penyusunan SKP dengan target dan realisasi keluaran sebanyak 6.446 orang;
9. Monitoring, evaluasi dan pelaporan proses akademik PNS Tugas Belajar dan Izin Belajar dengan target dan realisasi kegiatan berupa jumlah PNS Tugas Belajar yang menyelesaikan proses akademik tepat waktu sebanyak 3 orang, dan jumlah PNS yang memperoleh izin belajar sebanyak 120 orang;
10. Penyelenggaraan sidang majelis pertimbangan kepegawaian, dengan target dan realisasi keluaran jumlah PNS yang menjalani sidang sebanyak 4 orang;
11. Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi, dengan target dan realisasi keluaran jumlah PNS berprestasi yang memperoleh penghargaan tepat waktu sebanyak 341 orang;
12. Pembangunan/pengembangan SIMPEG/SAPK dengan keseluruhan target dan realisasi keluaran masing-masing 100%.

Program/kegiatan yang tingkat realisasi kinerja keluarannya melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, antara lain :

- a. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
 1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan dengan indikator kegiatan berupa jumlah PNS yang telah mengikuti kegiatan ini dengan predikat baik. Keluaran yang ditargetkan adalah 148 orang dan terealisasi sebanyak 211 orang atau 143%;
 2. Sosialisasi PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, dengan target 80 orang PNS yang mengikuti kegiatan ini dan terealisasi sebanyak 83 orang atau 104%.
- b. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
 1. Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan ujian dinas, yang ditargetkan sebanyak 5 orang PNS yang lulus ujian dinas dan 50 orang PNS yang lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah. Sedangkan realisasi kegiatan ini melebihi target yang telah direncanakan, yaitu sebanyak 8 orang PNS yang lulus ujian dinas atau 160% dan 76 orang PNS yang lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah atau sebesar 152%;
 2. Asistensi, monitoring dan evaluasi penyelesaian LHKPN dan LHKASN, dengan target PNS yang telah melaporkan LHKASN tepat waktu sebanyak 270 orang, dan terealisasi sebanyak 628 orang atau 233%;
 3. Pensiun PNS. Kegiatan ini memiliki tiga indikator keluaran, dimana dua diantaranya melebihi target keluaran yang telah direncanakan. Kedua



indikator tersebut adalah jumlah kartu peserta Taspen yang diterbitkan tepat waktu dengan target 50 orang dan terealisasi 78 orang atau 156%, dan jumlah PNS yang memperoleh hak pensiun tepat waktu yang ditargetkan 175 orang dan terealisasi sebanyak 190 orang atau 109%.

Permasalahan yang dihadapi berdasarkan hasil evaluasi adalah rendahnya *self-awareness* masing-masing PNS wajib lapor dalam menjalankan kewajiban, khususnya dalam hal pelaporan LP2P dan LHKPN serta LHKASN. Sehingga hal tersebut menyebabkan target kinerja yang telah ditetapkan tidak dapat tercapai 100%. Peralihan regulasi dalam hal pengisian LHKPN, LHKASN dan LP2P juga tidak seiring dengan kemampuan beberapa PNS wajib lapor dalam menggunakan aplikasi online. Penggunaan aplikasi online dalam pengisian LHKPN, LHKASN dan LP2P dimulai sejak tahun 2017. Padahal tahun 2016, pengisian LHKPN, LHKASN dan LP2P masih dilakukan secara manual.

Adapun faktor pendukung pencapaian kinerja sehingga dapat melebihi target yang direncanakan tahun 2017, antara lain :

1. Ketersediaan fasilitator penyelenggaraan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Fasilitator yang dimaksud dalam hal ini adalah Lembaga Administrasi Negara Makassar dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan, dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan struktural.
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kedisiplinan terhadap SKPD dalam rangka pembinaan pegawai;
3. *Political will* Pemerintah Kabupaten Wajo dalam menerapkan *punishment* bagi ASN yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Tersedianya arsip kepegawaian PNS secara digital/online pada aplikasi si-Dasri yang mendukung proses administrasi kepegawaian;
5. Pelayanan administrasi kepegawaian sebagian besar telah menggunakan aplikasi, seperti SAPK bagi pensiun dan kenaikan pangkat, si-Peka bagi pengajuan usulan kenaikan pangkat, si-Jaka bagi pengajuan kenaikan gaji berkala;
6. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai;
7. Tersedianya media sosial *whatsapp* yang memfasilitasi grup-grup kepegawaian sehingga memudahkan koordinasi antara pengelola administrasi kepegawaian pada BKPSDM Kabupaten Wajo dengan SKPD terkait. Implementasi yang timbul dari tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan terhadap target capaian program Revisi Renstra BKPSDM Kabupaten Wajo selanjutnya adalah bahwa dalam perencanaan target berikutnya, harus melihat hasil evaluasi kinerja pelaksanaan Renja tahun sebelumnya. Untuk kegiatan yang kinerjanya kurang baik, maka patut dipertimbangkan dalam menetapkan target kinerja selanjutnya, baik diturunkan atau sebanding dengan tahun sebelumnya.



| KODE | URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/ KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>) | TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA OPD TAHUN 2019 (AKHIR PERIODE RENSTRA OPD) | REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016 (n-3) | TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN OPD TAHUN 2017 (TAHUN LALU/ n-2) | | | TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RENJA OPD TAHUN BERJALAN (TAHUN n-1) | PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RENSTRA OPD S/D TAHUN 2018 (TAHUN BERJALAN/ n-1) | | CATATAN |
|---------------|---|---|---|--|--|-----------|--------------------------|--|--|--------------------|---------|
| | | | | | Target | Realisasi | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian | Tingkat Capaian | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11 | 12 |
| 4 05 08 05 17 | Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah | Persentase ASN yang meningkat kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan (%) | 71 | 71 | | | | | 71 | 100,00% | |
| | | Jumlah PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional dengan predikat Baik (Orang) | 267 | | 240 | 240 | 100% | 11 | 251 | 94,01% | |
| 4 05 08 05 1 | Pendidikan dan pelatihan formal | Persentase ASN yang meningkat kompetensinya melalui pendidikan formal (%) | 71 | 71 | | | | | 71 | 100,00% | |
| | | Jumlah ASN yang lulus pendidikan dan pelatihan formal dengan tepat waktu dan berpredikat BAIK (Orang) | 22 | | 14 | 14 | 100% | 2 | 16 | 72,73% | |
| 4 05 08 05 | Diklat teknis manajemen ASN | Persentase ASN yang meningkat kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan (%) | 71 | 71 | | | | | 71 | 100,00% | |
| | | Jumlah ASN yang lulus pendidikan dan pelatihan teknis manajemen ASN dengan predikat Baik (Orang) | 80 | | 80 | 80 | 100% | 0 | 80 | 100,00% | |
| 4 05 08 05 3 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Persentase ASN yang meningkat kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan (%) | 71 | 71 | | | | | 71 | 100,00% | |
| | | Jumlah PNS yang telah mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan dengan predikat BAIK (Orang) | 303 | | 148 | 211 | 143% | 75 | 286 | 94,39% | |
| 4 05 08 05 | Bimbingan teknis manajemen kepegawaian | Persentase ASN yang meningkat kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan (%) | 71 | 71 | | | | | 71 | 100,00% | |
| | Pelatihan e-kinerja | Persentase ASN yang meningkat kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan (%) | 71 | 71 | | | | | 71 | 100,00% | |
| 4 05 08 05 | Bimbingan teknis aplikasi e-kinerja | Jumlah PNS yang mengikuti bimbingan teknis aplikasi e-kinerja (Orang) | 50 | | | | | | 0 | 0,00% | |

| KODE | URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) | TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA OPD TAHUN 2019 (AKHIR PERIODE RENSTRA OPD) | REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016 (n-3) | TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN OPD TAHUN 2017 (TAHUN LALU/ n-2) | | | TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RENJA OPD TAHUN BERJALAN (TAHUN n-1) | PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RENSTRA OPD S/D TAHUN 2018 (TAHUN BERJALAN/ n-1) | | CATATAN |
|---------------|--|--|---|---|---|-----------|-----------------------|---|---|-----------------|---------|
| | | | | | Target | Realisasi | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian | Tingkat Capaian | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11 | 12 |
| | Bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan berbasis akrual TA 2016 | Persentase ASN yang meningkat kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan (%) | 71 | 71 | | | | | 71 | 100,00% | |
| 4 05 08 05 | Diklat dan pendampingan penerapan sistem manajemen mutu | Jumlah PNS yang telah mengikuti diklat dan pendampingan penerapan sistem manajemen mutu dengan predikat Baik | 40 | | 0 | 0 | 0% | 40 | 40 | 100,00% | |
| 4 05 08 05 | Sosialisasi PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN | Jumlah PNS yang telah mengikuti sosialisasi PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN (Orang) | 80 | | 80 | 80 | 100% | 0 | 80 | 100% | |
| 4 05 08 07 | Program pembinaan dan pengembangan aparatur | Persentase ASN yang mengisi jabatan sesuai standar kompetensi | 85 | 63 | 67 | 67 | 100% | 72 | 72 | 84,71% | |
| 4 05 08 07 11 | Analisis kebutuhan diklat, monitoring dan evaluasi hasil diklat | Persentase ASN yang meningkat kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan (%) | 71 | 71 | | | | | 71 | 100% | |
| | | Jumlah dokumen analisis kebutuhan diklat, monitoring dan evaluasi hasil diklat (Dokumen) | 6 | | 2 | 2 | 100% | 2 | 4 | 67% | |
| 4 05 08 07 02 | Seleksi penerimaan CPNS | Jumlah peserta yang lulus dalam seleksi penerimaan Calon PNS (Orang) | 274 | | 74 | 74 | 100% | 100 | 174 | 64% | |
| 4 05 08 07 06 | Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN | Persentase jabatan yang diisi oleh aparatur sipil negara sesuai dengan kompetensi (%) | 63 | 63 | | | | | 63 | 100% | |
| | | Jumlah pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN (Kali) | 1 | | 1 | 1 | 100% | | 1 | 100% | |
| 4 05 08 07 04 | Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat PNS | Persentase kenaikan pangkat pegawai tepat waktu (%) | 90 | 90 | | | | | 90 | 100% | |
| | | Jumlah PNS yang memperoleh kenaikan pangkat tepat waktu (Orang) | 3252 | | 1084 | 1084 | 100% | 1084 | 2168 | 67% | |



| KODE | URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) | TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA OPD TAHUN 2019 (AKHIR PERIODE RENSTRA OPD) | REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016 (n-3) | TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN OPD TAHUN 2017 (TAHUN LALU/ n-2) | | | TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RENJA OPD TAHUN BERJALAN (TAHUN n-1) | PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RENSTRA OPD S/D TAHUN 2018 (TAHUN BERJALAN/ n-1) | | CATATAN | | | |
|------|---|--|---|---|---|--|-----------------------|---|---|-----------------|------------|------------|------------|--|
| | | | | | Target | Realisasi | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian | Tingkat Capaian | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11 | 12 | | | |
| | | Jumlah PNS yang memperoleh kenaikan gaji berkala tepat waktu (Orang) | 666 | | 222 | 222 | 100% | 222 | 444 | 67% | | | | |
| 4 | 05 | 08 | | Penyelenggaraan ujian dinas bagi PNS | Tertindaknya penyelenggaraan ujian dinas bagi PNS (Persen) | 63 | 63 | | | 63 | 100% | | | |
| 4 | 05 | 08 | 07 | 10 | Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan ujian dinas | Jumlah PNS yang lulus ujian dinas (Orang) | 18 | 8 | 8 | 100% | 5 | 13 | 72% | |
| | | | | | Jumlah PNS yang lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah (Orang) | 176 | 76 | 76 | 100% | 50 | 126 | 72% | | |
| 4 | 05 | 08 | 07 | 17 | Seleksi promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama dan administrator | Persentase jabatan yang diisi oleh aparatur sipil negara sesuai dengan kompetensi (%) | 90,15 | 90,15 | | | 90,15 | 100% | | |
| | | | | | Jumlah penyelenggaraan seleksi promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama dan administrator (Kali) | 4 | 2 | 2 | 100% | 1 | 3 | 75% | | |
| | | | | | Penempatan PNS | Persentase jabatan yang diisi oleh aparatur sipil negara sesuai dengan kompetensi (%) | 63 | 63 | | | 63 | 100% | | |
| | | | | | Penempatan dan pemerataan PNS | Persentase jabatan yang diisi oleh aparatur sipil negara sesuai dengan kompetensi (%) | 63 | 63 | | | 63 | 100% | | |
| | | | | | Penempatan jabatan pelaksana dan jabatan fungsional | Jumlah penempatan jabatan pelaksana dan jabatan fungsional (SK) | 600 | | | | 0 | 0% | | |
| 4 | 05 | 08 | 07 | 03 | Pengambilan sumpah jabatan/ pelantikan pejabat JPT, administrator dan pengawas | Jumlah pengambilan sumpah jabatan/ pelantikan pejabat JPT, administrator dan pengawas (Kali) | 23 | 11 | 11 | 100% | 6 | 17 | 74% | |
| | | | | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Tingkat Disiplin Aparatur (Persen) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian | 60 | 60 | | | 60 | 60 | 100% | |
| | | | | | Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya (Pasang) | 66 | 66 | 66 | 100% | 66 | 66 | 100% | | |



| KODE | URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) | TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA OPD TAHUN 2019 (AKHIR PERIODE RENSTRA OPD) | REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016 (n-3) | TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN OPD TAHUN 2017 (TAHUN LALU/ n-2) | | | TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RENJA OPD TAHUN BERJALAN (TAHUN n-1) | PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RENSTRA OPD S/D TAHUN 2018 (TAHUN BERJALAN/ n-1) | | CATATAN |
|---------------|--|---|---|---|---|-----------|-----------------------|---|---|-----------------|---------|
| | | | | | Target | Realisasi | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian | Tingkat Capaian | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11 | 12 |
| | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | Jumlah pengadaan pakaian hari-hari tertentu (Pasang) | 66 | | 66 | 66 | 100% | 66 | 66 | 100% | |
| 4 05 08 07 | Program pembinaan dan pengembangan aparatur | Persentase tingkat kedisiplinan ASN | 85 | 63 | 67 | 67 | 100% | 72 | 72 | 84,71% | |
| 4 05 08 07 12 | Monitoring dan evaluasi penegakan disiplin PNS | Persentase tingkat kehadiran ASN | 85 | 85 | | | | | 85 | 100% | |
| | Monitoring dan evaluasi pelaporan kehadiran PNS | Jumlah PNS yang memperoleh monitoring dan evaluasi penegakan disiplin | 6.146 | | 6.621 | 6.621 | 100% | 6.296 | 6.296 | 102% | |
| 4 05 08 07 13 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja PNS | Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi pelaporan kinerja PNS (Orang) | 6.146 | | 6.646 | 6.646 | 100% | 6.296 | 6.296 | 102% | |
| 4 0 08 07 21 | Asistensi dan fasilitasi penyusunan Sasaran Kerja Pegawai | Persentase keaktifan dan kepatuhan PNS dalam penyusunan SKP dan P2KPNS (%) | 80 | 80 | | | | 80 | 80 | 100% | |
| | Penyusunan sasaran kerja pegawai berbasis aplikasi e-kinerja | Jumlah ASN yang telah menyusun Sasaran Kerja Pegawai melalui aplikasi e-kinerja (Orang) | 6.446 | | 6.446 | 6.446 | 100% | | 6.446 | 100% | |
| 4 05 08 07 22 | Asistensi dan fasilitasi penilaian Sasaran Kerja Pegawai | Persentase keaktifan dan kepatuhan PNS dalam penyusunan SKP dan P2KPNS (%) | 80 | 80 | | | | | 80 | 100% | |
| | Penilaian sasaran kerja pegawai berbasis aplikasi e-kinerja | Jumlah ASN yang telah memperoleh penilaian Sasaran Kerja Pegawai melalui aplikasi e-kinerja (Orang) | 6.446 | | 6.446 | 6.446 | 100% | | 6.446 | 100% | |
| 4 05 08 07 9 | Asistensi dan evaluasi penyelesaian LP2P | Persentase keaktifan dan kepatuhan PNS dalam penyampaian LHKPN, LHKASN dan LP2P | 58 | 58 | | | | | 58 | 100% | |
| 4 05 08 07 9 | Monitoring dan evaluasi penyelesaian LP2P | Jumlah ASN yang telah menyelesaikan LP2P tepat waktu (Orang) | 15.957 | | 5.465 | 5.465 | 100% | 5.246 | 10.711 | 67% | |
| 4 05 08 07 18 | Asistensi, monitoring dan evaluasi penyelesaian LHKPN dan LHKASN | Persentase keaktifan dan kepatuhan PNS dalam penyampaian LHKPN, LHKASN, dan LP2P (%) | 58 | 58 | | | | | 58 | 100% | |



| KODE | URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) | TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA OPD TAHUN 2019 (AKHIR PERIODE RENSTRA OPD) | REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016 (n-3) | TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN OPD TAHUN 2017 (TAHUN LALU/ n-2) | | | TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RENJA OPD TAHUN BERJALAN (TAHUN n-1) | PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RENSTRA OPD S/D TAHUN 2018 (TAHUN BERJALAN/ n-1) | | CATATAN | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|--|-----------------------|---|---|-----------------|-------------|--------------|--------------|---------------|-----|--|
| | | | | | Target | Realisasi | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian | Tingkat Capaian | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11 | 12 | | | | | |
| | | Jumlah ASN yang telah melaporkan LHKPN tepat waktu (Orang) | 396 | | 132 | 43 | 33% | 132 | 175 | 44% | | | | | | |
| | | Jumlah ASN yang telah melaporkan LHKASN tepat waktu (Orang) | 810 | | 270 | 628 | 233% | 270 | 898 | 111% | | | | | | |
| | Monitoring, evaluasi dan pelaporan proses akademik PNS Tugas Belajar dan Izin Belajar | Persentase ASN yang meningkat kompetensinya melalui pendidikan formal (%) | 100 | 100 | | | | | 100 | 100% | | | | | | |
| | | Jumlah PNS Tugas Belajar yang menyelesaikan proses akademik tepat waktu (Orang) | 9 | | 3 | 3 | 100% | 3 | 6 | 67% | | | | | | |
| | | Jumlah PNS yang memperoleh Izin Belajar (Orang) | 270 | | 120 | 120 | 100% | 75 | 195 | 72% | | | | | | |
| 4 | 05 | 07 | 08 | 14 | Penyelenggaraan sidang Majelis Pertimbangan Kepegawaian | Jumlah PNS yang menjalani sidang Majelis Pertimbangan Kepegawaian (Orang) | 8 | | 4 | 4 | 100% | 2 | 6 | 75% | | |
| 4 | 05 | 07 | 08 | 19 | Pemberian penghargaan dan pelepasan pensiun PNS | Persentase pensiun pegawai tepat waktu (%) | 90 | 90 | | | | | 90 | 100% | | |
| | | | | | | Jumlah PNS yang menerima Kartu Peserta Taspen tepat waktu (Orang) | 100 | | 78 | 78 | 100% | | 78 | 78% | | |
| | | | | | | Jumlah PNS yang memperoleh hak pensiun tepat waktu (Orang) | 490 | | 190 | 190 | 100% | | 150 | 340 | 69% | |
| | | | | | | Jumlah Pensiun PNS yang menerima penghargaan dan pelepasan pensiun (Orang) | 439 | | 129 | 129 | 100% | | 142 | 271 | 62% | |
| 4 | 05 | 08 | 07 | 05 | Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi | Persentase PNS yang memperoleh penghargaan tepat waktu (%) | 90 | 90 | | | | | 90 | 100% | | |
| | | | | | | Jumlah PNS berprestasi yang memperoleh penghargaan tepat waktu (Orang) | 1.141 | | 341 | 341 | 100% | | 400 | 741 | 65% | |
| 4 | 05 | 08 | 01 | 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian | 90,52 | 88,74 | 89,63 | 89,63 | 100% | 90,07 | 90,07 | 99,50% | | |
| 4 | 05 | 08 | 01 | 01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian | 60 | 60 | | | | | 60 | 100% | | |
| | | | | | | Waktu penyediaan jasa surat menyurat (Bulan) | 36 | | 12 | 12 | 100% | | 12 | 24 | 67% | |



| KODE | URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) | TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA OPD TAHUN 2019 (AKHIR PERIODE RENSTRA OPD) | REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016 (n-3) | TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN OPD TAHUN 2017 (TAHUN LALU/ n-2) | | | TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RENJA OPD TAHUN BERJALAN (TAHUN n-1) | PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RENSTRA OPD S/D TAHUN 2018 (TAHUN BERJALAN/ n-1) | | CATATAN | | | | |
|------|---|--|---|---|---|--|-----------------------|---|---|-----------------|---------|----|----|------|--|
| | | | | | Target | Realisasi | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian | Tingkat Capaian | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11 | 12 | | | | |
| 4 | 05 | 08 | 02 | 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian | 60 | 60 | | | | | 60 | 100% | |
| | | | | | Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan) | | 36 | | 12 | 12 | 100% | 12 | 24 | 67% | |
| 4 | 05 | 08 | 06 | 06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional | Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian | 60 | 60 | | | | | 60 | 100% | |
| | | | | | Waktu penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional (Bulan) | | 36 | | 12 | 12 | 100% | 12 | 24 | 67% | |
| 4 | 05 | 08 | 07 | 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian | 60 | 60 | | | | | 60 | 100% | |
| | | | | | Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan (Bulan) | | 36 | | 12 | 12 | 100% | 12 | 24 | 67% | |
| 4 | 05 | 08 | 08 | 08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian | 60 | 60 | | | | | 60 | 100% | |
| | | | | | Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor (Bulan) | | 36 | | 12 | 12 | 100% | 12 | 24 | 67% | |
| 4 | 05 | 08 | 09 | 09 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian | 60 | 60 | | | | | 60 | 100% | |
| | | | | | Waktu penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja (Bulan) | | 36 | | 12 | 12 | 100% | 12 | 24 | 67% | |
| 4 | 05 | 08 | 12 | 12 | Penyediaan komponen instalasi listrik | Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian | 60 | 60 | | | | | 60 | 100% | |
| | | | | | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (Bulan) | Waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (Bulan) | 36 | | 12 | 12 | 100% | 12 | 24 | 67% | |
| 4 | 05 | 08 | 15 | 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian | 60 | 60 | | | | | 60 | 100% | |
| | | | | | Waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Bulan) | | 36 | | 12 | 12 | 100% | 12 | 24 | 67% | |
| 4 | 05 | 08 | 18 | 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian | 60 | 60 | | | | | 60 | 100% | |



| KODE | URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) | TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA OPD TAHUN 2019 (AKHIR PERIODE RENSTRA OPD) | REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016 (n-3) | TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN OPD TAHUN 2017 (TAHUN LALU/ n-2) | | | TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RENJA OPD TAHUN BERJALAN (TAHUN n-1) | PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RENSTRA OPD S/D TAHUN 2018 (TAHUN BERJALAN/ n-1) | | CATATAN | | | | |
|------|---|--|---|---|---|---|-----------------------|---|---|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|---------------|--|
| | | | | | Target | Realisasi | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian | Tingkat Capaian | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11 | 12 | | | | |
| | | Waktu penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Bulan) | 36 | | 12 | 12 | 100% | 12 | 24 | 67% | | | | | |
| 4 | 05 | 08 | 22 | 22 | Penyediaan jasa administrasi kepegawaian | Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian | 60 | 60 | | | 60 | 100% | | | |
| | | | | | Waktu penyediaan jasa administrasi kepegawaian (Bulan) | | 36 | | 12 | 12 | 100% | 12 | 24 | 67% | |
| 4 | 05 | 08 | 02 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian | 90,52 | 88,74 | 89,63 | 89,63 | 100% | 90,07 | 90,07 | 99,50% | |
| 4 | 05 | 08 | 02 | | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Persentase tertib administrasi barang/aset (%) | 100 | 100 | | | | | 100 | 100% | |
| | | | | | Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor (Unit) | 2 Proyektor | | | 1 Proyektor | 1 Proyektor | 100% | 0 Proyektor | 1 Proyektor | 50,00% | |
| | | | | | | 3 AC | | | 3 AC | 3 AC | 100% | 0 AC | 3 AC | 100,00% | |
| 4 | 05 | 08 | 02 | 09 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Persentase tertib administrasi barang/aset (%) | 100 | 100 | | | | | 100 | 100% | |
| | | | | | Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor (Unit) | 21 Komputer PC | | | 20 Komputer PC | 20 Komputer PC | 100% | 1 Komputer PC | 21 Komputer PC | 100,00% | |
| | | | | | | 20 Komputer CAT | | | 20 Komputer CAT | 20 Komputer CAT | 100% | 0 Komputer CAT | 20 Komputer CAT | 100,00% | |
| | | | | | | 14 Printer | | | 12 Printer | 12 Printer | 100% | 1 Printer | 13 Printer | 92,86% | |
| | | | | | | 5 Scanner | | | 5 Scanner | 5 Scanner | 100% | 0 Scanner | 5 Scanner | 100,00% | |
| | | | | | | 27 UPS | | | 7 UPS | 7 UPS | 100% | 20 UPS | 27 UPS | 100,00% | |
| | | | | | | 1 CCTV | | | 1 CCTV | 1 CCTV | 100% | 0 CCTV | 1 CCTV | 100,00% | |
| | | | | | | 10 Laptop | | | 0 Laptop | 0 Laptop | 0% | 4 Laptop | 4 Laptop | 40,00% | |



| KODE | URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) | TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA OPD TAHUN 2019 (AKHIR PERIODE RENSTRA OPD) | REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016 (n-3) | TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN OPD TAHUN 2017 (TAHUN LALU/ n-2) | | | TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RENJA OPD TAHUN BERJALAN (TAHUN n-1) | PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RENSTRA OPD S/D TAHUN 2018 (TAHUN BERJALAN/ n-1) | | CATATAN | | | | |
|------|---|--|---|---|---|--|-----------------------|---|---|---------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------|--|
| | | | | | Target | Realisasi | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian | Tingkat Capaian | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11 | 12 | | | | |
| 4 | 05 | 08 | 02 | 10 | Pengadaan meubeleu | Persentase tertib administrasi barang/aset (%) | 100 | 100 | | | | 100 | 100% | | |
| | | | | | Jumlah pengadaan meubeleu (Unit) | 20 Meja CAT | | | 20 Meja CAT | 20 Meja CAT | 100% | 0 Meja CAT | 20 Meja CAT | 100% | |
| | | | | | | 70 Kursi Kerja | | | 20 Kursi Kerja | 20 Kursi Kerja | 100% | 0 Kursi Kerja | 20 Kursi Kerja | 29% | |
| | | | | | | 20 Meja Kerja | | | 0 Meja Kerja | 0 Meja Kerja | 0% | 0 Meja Kerja | 0 Meja Kerja | 0% | |
| | | | | | | 1 Rak sound system | | | 0 Rak sound system | 0 Rak sound system | 0% | 1 Rak sound system | 1 Meja Kerja | 100% | |
| | | | | | | 1 Meja finger print | | | 0 Meja finger print | 0 Meja finger print | 0% | 1 Meja finger print | 1 Meja Kerja | 100% | |
| 4 | 05 | 08 | 02 | 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Persentase tertib administrasi barang/aset (%) | 100 | 100 | | | | 100 | 100% | | |
| | | | | | Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala (Gedung) | 1 | | | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | |
| 4 | 05 | 08 | 02 | 24 | Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan/ dinas operasional | Persentase tertib administrasi barang/aset (%) | 100 | 100 | | | | 100 | 100% | | |
| | | | | | Waktu pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (Bulan) | 36 | | | 12 | 12 | 100% | 12 | 24 | 66,67% | |
| 4 | 05 | 08 | 02 | | Rehabilitasi Sedang/ berat gedung kantor | Persentase tertib administrasi barang/aset (%) | 100 | 100 | | | | 100 | 100% | | |
| | | | | | Jumlah ruang kantor yang direhabilitasi (Ruangan) | 8 | | | 4 | 4 | 100% | 2 | 6 | 75,00% | |
| 4 | 05 | 08 | 08 | | Program penataan sistem informasi kepegawaian (SIMPEG) | Persentase ASN yang datanya akurat | 100 | 90 | 92,5 | 92,5 | 100% | 95 | 95 | 95,00% | |
| 4 | 05 | 08 | 08 | 01 | Pembangunan/ pengembangan SIMPEG | Jumlah pembangunan/ pengembangan SIMPEG (Aplikasi) | 6 | 6 | | | | 6 | 12 | 200% | |



| KODE | URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) | TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA OPD TAHUN 2019 (AKHIR PERIODE RENSTRA OPD) | REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016 (n-3) | TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN OPD TAHUN 2017 (TAHUN LALU/ n-2) | | | TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RENJA OPD TAHUN BERJALAN (TAHUN n-1) | PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RENSTRA OPD S/D TAHUN 2018 (TAHUN BERJALAN/ n-1) | | CATATAN |
|------------|---|--|---|---|---|------------|-----------------------|---|---|-----------------|-------------|
| | | | | | Target | Realisasi | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian | Tingkat Capaian | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11 | 12 |
| | Pembangunan/ pengembangan SIMPEG/ SAPK | Jumlah pembangunan/ pengembangan SIMPEG/SAPK (Aplikasi) | 19 | 6 | 8 | 8 | 100% | 3 | 17 | 89% | |
| | | Waktu pengelolaan dan pemeliharaan dokumen dan arsip kepegawaian (Bulan) | 36 | | 12 | 12 | 100% | 12 | 24 | 67% | |
| | | Jumlah ASN yang memperoleh Kartu Pegawai tepat waktu (Orang) | 85 | | 5 | 5 | 100% | 75 | 80 | 94% | |
| | | Jumlah ASN yang memperoleh Karis/Karsu tepat waktu (Orang) | 237 | | 97 | 97 | 100% | 70 | 167 | 70% | |
| 4 05 08 08 | 2 | Penyusunan formasi dan pengolahan e-formasi ASN | Jumlah dokumen penyusunan formasi dan pengolahan e-formasi ASN (Dokumen) | 3 | | 1 | 100% | 1 | 2 | 67% | |
| 4 05 08 08 | | Pendataan ulang e-PUPNS | Persentase ASN yang datanya akurat | 80 | 80 | | | | 80 | 100% | |
| 4 05 08 26 | | Program Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan | Penilaian LAKIP oleh Inspektorat | 85 | 60 | 70 | 70 | 100% | 80 | 80 | 94% |
| | | | Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan | 100 | 75 | 75 | 75 | 100% | 85 | 85 | 85% |
| | | | Persentase temuan pengelolaan keuangan oleh Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% |
| 4 05 08 26 | 01 | Penyusunan Renja SKPD | Nilai evaluasi AKIP | 60 | 60 | | | | 60 | 100,00% | |
| | | | Jumlah dokumen Renja (Dokumen) | 5 | | 1 | 100% | 2 | 3 | 60,00% | |
| 4 05 08 26 | 02 | Penyusunan LAKIP SKPD | Nilai evaluasi AKIP | 60 | 60 | | | | 60 | 100,00% | |
| | | | Jumlah LAKIP (Laporan) | 3 | | 1 | 100% | 1 | 2 | 66,67% | |
| 4 05 08 26 | 03 | Penyusunan Renstra SKPD | Jumlah dokumen Renstra/Revisi Renstra (Dokumen) | 2 | | | | 1 | 1 | 50,00% | |
| 4 05 08 26 | 05 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti | 100% | 100% | | | | 1 | 100,00% | |
| | | | Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang telah disusun (Laporan) | 3 | | 1 | 100% | 1 | 2 | 66,67% | |
| 4 05 08 26 | 01 | Asistensi penyusunan RKA Pokok dan Perubahan | Jumlah dokumen RKA yang diasistensi (Dokumen) | 6 | | 2 | 100% | 2 | 4 | 66,67% | |



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

2.2.1. Tugas, Fungsi dan Kedudukan Organisasi

Tugas BKPSDM Kabupaten Wajo sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Wajo Nomor 79 Tahun 2016 adalah *“membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang menjadi kewenangan daerah.”* Selanjutnya dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, BKPSDM Kabupaten Wajo menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan SDM;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan SDM;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan SDM;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang kepegawaian dan pengembangan SDM;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan bidang kepegawaian dan pengembangan SDM

Susunan organisasi dan tata kerja BKPSDM Kabupaten Wajo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yang diuraikan sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan
 - c. Subbagian Keuangan
3. Bidang Pengadaan dan Informasi ASN
 - a. Subbidang Pengadaan ASN dan Arsip Kepegawaian
 - b. Subbidang Pengolahan Data dan Informasi ASN
 - c. Subbidang Teknologi Informasi
4. Bidang Mutasi dan Promosi ASN
 - a. Subbidang Mutasi
 - b. Subbidang Kepangkatan
 - c. Subbidang Pengembangan Karir dan Promosi
5. Bidang Pengembangan Kompetensi ASN
 - a. Subbidang Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi Profesi
 - b. Subbidang Diklat Teknis dan Fungsional
 - c. Subbidang Evaluasi dan Pengembangan Kompetensi
6. Bidang Kinerja, Pembinaan dan Fasilitasi Profesi ASN
 - a. Subbidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur I
 - b. Subbidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur II
 - c. Subbidang Disiplin, Pemberhentian, Penghargaan dan Fasilitasi Profesi ASN
7. Kelompok Jabatan Fungsional

a



Kebijakan perencanaan dan penganggaran yang dapat dilakukan dalam mengatasi hal-hal yang menjadi penyebab tidak tercapainya target kinerja antara lain :

1. Untuk tahun anggaran berikutnya, perencanaan besaran anggaran harus sesuai dengan output kegiatan yang dihasilkan sehingga sisa anggaran atau pun kurang terserapnya anggaran dapat diminimalisir.
2. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelum anggaran disahkan, agar tepat waktu dan tepat sasaran sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dalam DPA.
3. Untuk pengesahan DPPA agar sesuai dan tepat waktu sehingga seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan perubahan anggaran yang telah ditetapkan;
4. Selain dibiayai oleh APBD murni, BKPSDM Kabupaten Wajo perlu membuka penawaran beasiswa dari luar bagi ASN melalui perangkat daerah dengan mencari informasi beasiswa dari seluruh Kementerian dan Lembaga yang menyediakan beasiswa sesuai kompetensi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo;
5. Mengembangkan sistem survey kepuasan atas layanan administrasi kepegawaian secara digital/online;
6. Terus menerus melakukan sosialisasi dalam rangka pelaporan LP2P dan LHKPN agar dapat tepat waktu.

2.2.2. Pengolahan Data Informasi

Pengolahan data informasi untuk mengukur capaian indikator kinerja menggunakan formula yang disajikan pada Tabel T-A.1 pada Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018. Indikator sasaran BKPSDM Kabupaten Wajo sebagai salah satu unsur penunjang urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan merujuk pada formula sebagaimana Tabel 2.2.3.



2.2.2. Kinerja Pelayanan BKPSDM Kabupaten Wajo

TABEL 2.2.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN WAJO

| NO. | INDIKATOR SASARAN | SPM/ STANDAR NASIONAL | IKK | TARGET RENSTRA OPD | | | | REALISASI CAPAIAN | | PROYEKSI | | CATATAN ANALISIS |
|-----|--|-----------------------------|-----|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| | | | | Tahun 2017 (n-2) | Tahun 2018 (n-1) | Tahun 2019 (n) | Tahun 2020 (n+1) | Tahun 2017 (n-2) | Tahun 2018 (n-1) | Tahun 2019 (n) | Tahun 2020 (n+1) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1. | Persentase ASN yang meningkat kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan | --- | --- | 80% | 90% | 100% | 100% | 86,67% | 56,12% | 100% | 100% | |
| 2. | Persentase ASN yang mengisi jabatan sesuai standar kompetensi | --- | --- | 67% | 72% | 85% | 85% | 100% | 100,00% | 85% | 85% | |
| 3. | Persentase tingkat kedisiplinan ASN | --- | --- | 90% | 95% | 100% | 100% | 91,17% | 66,06% | 100% | 100% | |
| 4. | Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian | --- | --- | 65 | 70 | 80 | 80 | 83,23 | 71,54 | 80 | 80 | |
| 5. | Persentase aparatur sipil negara yang datanya akurat | --- | --- | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 99,19% | 100% | 100% | |
| 6. | Nilai evaluasi kinerja pemerintah | --- | --- | 65 | 70 | 70 | 70 | 65 | 73,65 | 74 | 74,5 | |



TABEL 2.2.3.
PENGOLAHAN DATA INFORMASI INDIKATOR KINERJA
BIDANG URUSAN KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017

| NO. | INDIKATOR | RUMUS | TAHUN | | | | |
|-----|---|---|-------|-------|--------|--------|-------|
| | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Rata-Rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan (jp/orang) | $\frac{\text{Total periode waktu diklat}}{\text{Jumlah PNS yang mengikuti diklat}}$ | 3,44 | 10,97 | 3,55 | 6,87 | 7,47 |
| 2 | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal | $\frac{\text{Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal}}{\text{Jumlah total ASN}} \times 100\%$ | 0,92% | 2,37% | 19,02% | 11,60% | 9,57% |
| 3 | Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural | $\frac{\text{Jumlah ASN yang telah mengikuti diklat struktural}}{\text{Jumlah total jabatan}} \times 100\%$ | 4,17% | 2,89% | 11,31% | 7,36% | 4,28% |
| 4 | Jumlah Jabatan Pimpinan tinggi pada instansi pemerintah (Jabatan) | ----- | 34 | 36 | 36 | 43 | 43 |
| 5 | Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah (Jabatan) | ----- | 946 | 1.083 | 1.094 | 2.734 | 2.734 |
| 6 | Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah (Orang) | ----- | 4.676 | 4.591 | 4.452 | 3.877 | 3.808 |



2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Terselenggaranya tata pemerintahan yang baik menjadi syarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita luhur bangsa dan negara sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945, yaitu “mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penetapan sistem yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, bersih dan bertanggungjawab.

Untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita luhur bangsa dan negara, maka berdasarkan Peraturan Bupati Wajo Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo, maka rincian tugas pokok dan fungsi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Wajo adalah sebagai berikut :

1. BKPSDM Kabupaten Wajo dipimpin oleh Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam membina, mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian dan pengembangan SDM, serta pelaksanaan kesekretariatan Badan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut maka Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan pengembangan SDM;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian dan pengembangan SDM;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian dan pengembangan SDM ; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati baik lisan maupun tulisan sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional kegiatan serta mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan dalam lingkup BKPSDM Kabupaten Wajo sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, maka Sekretaris BKPSDM Kabupaten Wajo mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian, perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan serta keuangan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di bidang umum dan kepegawaian, perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan serta keuangan;



- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian, perlengkapan dan aset, perencanaan dan pelaporan serta keuangan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.
- 2.1. Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan, membagi tugas, membimbing, memeriksa hasil pekerjaan, mengumpulkan dan mengolah data serta mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang urusan ketatausahaan Badan meliputi pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, keprotokoleran dan perjalanan dinas, ketatalaksanaan, perlengkapan dan aset, kepegawaian dan tugas umum lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2.2. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan, membagi tugas, membimbing, memeriksa hasil serta mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang administrasi perencanaan dan pelaporan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2.3. Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan, membagi tugas, membimbing, memeriksa hasil pekerjaan, mengumpulkan dan mengolah data serta mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang administrasi keuangan meliputi penatausahaan, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 3. Bidang Pengadaan dan Informasi ASN dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional kegiatan, memberi petunjuk, menyelia pekerjaan, mengatur serta mengevaluasi kebijakan dan standardisasi teknis pengadaan dan penyediaan informasi ASN sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, maka Kepala Bidang Pengadaan dan Informasi ASN mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengadaan dan informasi ASN ;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengadaan dan informasi ASN ;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengadaan dan informasi ASN;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.
 - 3.1 Subbidang Pengadaan ASN dan Arsip Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, mengumpulkan dan mengolah data, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas serta



- mengajukan pertimbangan teknis pengadaan ASN dan arsip kepegawaian sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 3.2 Subbidang Pengolahan Data dan Informasi ASN dipimpin oleh Kepala Subbidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, mengumpulkan dan mengolah data, membimbing, memeriksa/mengecek dan membuat laporan tugas serta mengajukan pertimbangan teknis pengolahan data dan informasi ASN sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 - 3.3 Subbidang Teknologi Informasi dipimpin oleh Kepala Subbidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas di bidang teknologi informasi meliputi pengelolaan dan pengembangan sistem informasi ASN serta penyusunan *profile* dan publikasi manajemen ASN sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bidang Mutasi dan Promosi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional kegiatan dan mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang mutasi dan promosi ASN sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, maka Kepala Bidang Mutasi dan Promosi ASN mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang mutasi dan promosi ASN;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang mutasi dan promosi ASN;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang mutasi dan promosi ASN;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.
 - 4.1 Subbidang Mutasi dipimpin oleh Kepala Subbidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas di bidang mutasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - 4.2 Subbidang Kepangkatan dipimpin oleh Kepala Subbidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas di bidang kepangkatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - 4.3 Subbidang Pengembangan Karir dan Promosi oleh Kepala Subbidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas di bidang pengembangan karir dan promosi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bidang Pengembangan Kompetensi ASN dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional kegiatan dan memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang



pengembangan kompetensi ASN sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, maka Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi ASN mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan kompetensi ASN;
 - b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pengembangan kompetensi ASN;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan kompetensi ASN; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.
- 5.1 Subbidang Diklat Penjurangan dan Sertifikasi Profesi dipimpin oleh Kepala Subbidang yang mempunyai Tugas Pokok merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas di bidang diklat penjurangan dan sertifikasi profesi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- 5.2 Subbidang Diklat Teknis dan Fungsional dipimpin oleh Kepala Subbidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas di bidang diklat teknis dan fungsional sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 5.3 Subbidang Evaluasi dan Pengembangan Kompetensi dipimpin oleh Kepala Subbidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas di bidang evaluasi dan pengembangan kompetensi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bidang Kinerja, Pembinaan, dan Fasilitasi Profesi ASN dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional kegiatan, memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang kinerja, pembinaan, dan fasilitasi profesi ASN sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, maka Kepala Bidang Kinerja, Pembinaan, dan Fasilitasi Profesi ASN mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kinerja, pembinaan, dan fasilitasi profesi ASN ;
 - b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang kinerja, pembinaan, dan fasilitasi profesi ASN ;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kinerja, pembinaan, dan fasilitasi profesi ASN ; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.
- 6.1 Subbidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur I dipimpin oleh Kepala Subbidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, mengumpulkan dan mengolah data serta mengevaluasi pelaksanaan



- tugas-tugas di bidang pembinaan pegawai yang meliputi penilaian dan evaluasi kinerja aparatur pada jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 6.2 Subbidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur II dipimpin oleh Kepala Subbidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas di bidang penilaian dan evaluasi kinerja aparatur pada jabatan fungsional sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 6.3 Subbidang Pembinaan dan Fasilitasi Profesi ASN dipimpin oleh Kepala Subbidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas di bidang pembinaan dan fasilitasi profesi ASN sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam menunjang tugas pokok Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.

Adapun isu-isu strategis dalam mencapai visi, misi tujuan dan sasaran organisasi yang akan dijalankan selama periode Revisi Renstra, antara lain sebagai berikut :

1. Aspek Organisasi

Pada aspek organisasi, sejumlah kondisi yang dialami BKPSDM Kabupaten Wajo, antara lain :

- a. Beberapa tugas dan fungsi organisasi yang belum memiliki unit yang secara jelas menanganinya, misalnya penyusunan SOP, evaluasi, penyempurnaan organisasi, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P).
- b. Struktur organisasi tidak relevan dengan ketentuan yang berlaku di bidang Aparatur Sipil Negara yang meniadakan eselonisasi dalam struktur organisasi.

2. Aspek Sumber Daya Manusia Aparatur

Pada aspek sumber daya manusia aparatur, sejumlah kondisi yang dialami BKPSDM Kabupaten Wajo, antara lain :

- a. Penempatan pegawai dalam jabatan belum sepenuhnya sesuai dengan standar kompetensi jabatan. Hal ini antara lain disebabkan oleh belum sesuainya standar kompetensi jabatan dengan spesifikasi jabatan;
- b. Dalam bidang pendidikan dan pelatihan pegawai, belum dilakukan perencanaan pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi jabatan atau kebutuhan organisasi ;
- c. Sistem penyesuaian ijazah belum menjamin kesesuaian dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi ;
- d. Pemerintah Kabupaten Wajo belum memiliki pedoman pola karir, sehingga pola rotasi pegawai yang ada belum mengarah pada peningkatan kompetensi dan kebutuhan organisasi ;



- e. PNS ditengarai masih tidak kompeten (*incompetence*) dalam menangani tugas dan fungsi di bidangnya khususnya pelayanan publik ;
- f. PNS belum terdistribusi berdasarkan kompetensi, keahlian dengan bidang tugas masing-masing (distribusi dan alokasi) ;
- g. PNS yang ada belum berkualifikasi sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi jabatan yang diduduki (*mismatch*) ;
- h. Pemberdayaan PNS belum optimal (*under empowering*);
- i. Kinerja PNS masih rendah (*under performance*) ;
- j. Pembinaan dan pengembangan karier jabatan PNS belum didasarkan pada standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dan pola karier PNS yang jelas ;
- k. Belum terintegrasinya Sistem Perencanaan dan Rekrutmen PNS berdasarkan kebutuhan formasi jabatan dan standar kompetensi jabatan yang mengakibatkan distribusi dan alokasi pegawai belum merata ;
- l. Pengembangan kapasitas dan kompetensi PNS belum optimal yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran penyelenggaraan diklat dan bimbingan teknis berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi ;
- m. Belum tersedianya sarana dan prasarana diklat yang memadai sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah ;
- n. Belum optimalnya pemberdayaan alumni diklat pada unit kerja masing-masing ;
- o. Kurangnya minat pegawai terhadap jabatan fungsional;
- p. Belum adanya nilai-nilai utama yang disepakati bersama sebagai landasan pegawai dalam bekerja;
- q. Belum adanya sistem keteladanan (*role model*) yang dibangun;
- r. Belum adanya strategi untuk mengelola perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur yang terdokumentasi dengan baik, lengkap dengan peta risiko kegagalan;
- s. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan kedisiplinan dan capaian kinerja oleh masing-masing atasan langsung kepada PNS yang berada di bawah kendali/pembinaannya.

3. Aspek Tata Laksana

Pada aspek tatalaksana, sejumlah kondisi yang dialami BKPSDM Kabupaten Wajo, antara lain :

- a. Belum optimalnya implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP), sehingga masih dianggap formalitas. Selain itu, SOP yang disusun masih cenderung parsial dan belum optimalnya harmonisasi antar-SOP yang telah ada;
- b. Belum optimalnya penerapan *e-Government* di lingkungan BKPSDM Kabupaten Wajo sebagai akibat rendahnya *self awareness* para pegawai dan belum sempurnanya sistem informasi yang terbangun;
- c. Belum dilakukannya evaluasi SOP yang baik secara periodik, disebabkan belum adanya pedoman evaluasi SOP;



- d. Perumusan kebijakan dan penyelenggaraan manajemen kepegawaian belum sepenuhnya didukung data dan informasi (*database*) kepegawaian yang memadai hal ini karena belum sinkronnya SIMPEG BKPSDM Kabupaten Wajo dengan perangkat daerah;
- e. Belum dilakukannya perencanaan pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi jabatan atau kebutuhan organisasi;
- f. Sistem Informasi Kepegawaian telah digunakan secara efektif untuk perhitungan jumlah dan penyebaran pegawai, perencanaan pegawai dan pensiun, namun belum digunakan untuk kepentingan manajemen kepegawaian secara luas, seperti kinerja, kompetensi, promosi, dan pemberian insentif.

4. Aspek Pengawasan

Pada aspek pengawasan, sejumlah kondisi yang dialami BKPSDM Kabupaten Wajo, antara lain :

- a. Atasan langsung belum melakukan tinjauan kesesuaian antara SOP dengan pelaksanaan tugas/kegiatan ;
- b. Rendahnya pemahaman pegawai mengenai prosedur pengadaan barang dan jasa.

5. Aspek Akuntabilitas Kinerja

Pada aspek akuntabilitas kinerja, sejumlah kondisi yang dialami BKPSDM Kabupaten Wajo, antara lain :

- a. Belum optimalnya perencanaan kinerja, diantaranya ditunjukkan oleh RENSTRA yang belum menggambarkan kondisi yang diinginkan, ketidakselarasan antara RENSTRA dengan DPA, dan efisiensi alokasi anggaran yang masih rendah;
- b. Belum optimalnya pengukuran kinerja, diantaranya ditunjukkan dengan belum adanya review kesesuaian antara rencana kinerja dengan LAKIP ;
- c. Belum optimalnya pelaporan kinerja, diantaranya ditunjukkan dengan belum seluruh unit pelaksana menyampaikan laporan kinerja dan kualitas laporan kinerja yang masih rendah sehingga belum menggambarkan kinerja yang sebenarnya ;
- d. Belum optimalnya evaluasi kinerja, yang ditunjukkan oleh belum adanya mekanisme evaluasi kinerja internal yang baik dan dilakukan secara berkala ;
- e. Evaluasi kinerja PNS belum didasarkan pada Sistem Penilaian Kinerja berbasis *merit*, yang memungkinkan capaian kinerja individu pegawai dapat mendorong peningkatan kariernya dan memungkinkan pemberian kompensasi dapat dilakukan secara adil berdasarkan prestasi pegawai sesuai dengan bobot jabatan dan beban kerja ;
- f. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan kedisiplinan dan capaian kinerja masing-masing atasan langsung kepada PNS yang berada di bawah kendali/pembinaannya.



6. Aspek Pelayanan Publik

Pada aspek pelayanan publik, sejumlah kondisi yang dialami BKPSDM Kabupaten Wajo, adalah belum disusunnya indikator kepuasan *stakeholders* dan belum dilakukannya survey kepuasan *stakeholders*.

7. Aspek Peraturan Perundang-undangan

Pada aspek peraturan perundang-undangan, sejumlah kondisi yang dialami BKPSDM Kabupaten Wajo, antara lain :

- a. SOP belum sepenuhnya mengkoordinasi langkah-langkah penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga berpotensi terjadinya tumpang tindih, disharmonisasi, dan multi tafsir;
- b. Kondisi kepegawaian yang ada masih diwarnai dengan tidak konsistennya penyelenggaraan manajemen PNS terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4. Review Rancangan Awal RKPD

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme aparatur menuju pemerintahan yang akuntabel yang pada tingkat perwujudannya memerlukan sumber daya yang kompeten dan profesional dalam pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilandasi oleh kecerdasan emosional dan spiritual diperlukan tersedianya sumber daya aparatur yang bertanggung jawab tepat fungsi dan tepat posisi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2019 Kabupaten Wajo sesuai dengan pagu indikatif dan analisis kebutuhan BKPSDM Kabupaten Wajo sebagaimana tersebut pada Tabel 2.5 dan Tabel 2.6.



TABEL 2.3.
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN
PERANGKAT DAERAH

Nama OPD : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo

| ASPEK CAPAIAN | CAPAIAN/KONDISI SAAT INI | STANDAR YANG DIGUNAKAN | FAKTOR YANG MEMPENGARUHI | | PERMASALAHAN PELAYANAN BKPSDM KABUPATEN WAJO |
|--|--|---------------------------------|---|--|--|
| | | | INTERNAL (KEWENANGAN) | EKSTERNAL (DI LUAR KEWENANGAN) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Gambaran Pelayanan BKPSDM Kabupaten Wajo | Pelayanan kepegawaian sebagai kontributor dalam mewujudkan ASN yang lebih profesional dan sejahtera | Capaian kinerja tahun 2008-2013 | Optimalisasi penerapan SOP dalam pelayanan kepegawaian dan diklat | Regulasi/ kebijakan yang terkait dengan manajemen ASN dan pelayanan kepegawaian | 1. Aspek organisasi berupa unit penanganan beberapa kegiatan yang belum jelas |
| Kajian Terhadap Renstra BKD Provinsi Sulawesi Selatan | Kontribusi dalam pelaksanaan manajemen ASN yang transparan dan akuntabel | Capaian kinerja tahun 2008-2013 | Koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi berbasis teknologi Informasi komunikasi. | Rapat-rapat koordinasi dan konsolidasi di tingkat provinsi | 2. Aspek SDM aparatur, berupa kompetensi, kualitas, pola pikir dan budaya kerja |
| Kajian terhadap Renstra Badan Diklat Provinsi Sulawesi Selatan | 1. Pelaksanaan kegiatan diklat struktural, teknis dan fungsional 2. Fasilitasi penyelenggaraan diklat pada kabupaten/kota se Sulawesi Selatan | Capaian kinerja tahun 2008-2012 | 1. Dukungan APBD 2. Kuantitas SDM aparatur 3. Akreditasi program diklat dan sistem manajemen mutu diklat 4. Sarana dan prasarana kediklatan | 1. Regulasi dan kebijakan di bidang kediklatan 2. Kepatuhan IP terhadap regulasi/ kebijakan 3. Lembaga diklat non pemerintah | 3. Aspek peraturan perundang-undangan berupa terjadinya <i>silo effect</i> , disharmonisasi, dan inkonsistensi 4. Aspek pengawasan yang terkait dengan penyeliaan dan tertib administrasi barang/jasa |
| Kajian Terhadap Renstra Kementerian Dalam Negeri | 1. Terbitnya beberapa regulasi yang terkait dengan penguatan kapasitas kelembagaan 2. Terbitnya beberapa regulasi yang terkait dengan desentralisasi dan otonomi daerah 3. Pencapaian tata kelola dalam meningkatkan kualitas dan transparansi proses rekrutmen CPNS melalui penerapan <i>e-announcement</i> dan sistem CAT. 4. Pelaksanaan advokasi hukum dalam rangka penguatan penyelenggaraan pemerintah daerah | Capaian kinerja tahun 2010-2014 | 1. Kewenangan dalam perumusan kebijakan di bidang pembangunan daerah 2. Optimalisasi peraturan perundang-undangan 3. Aspek SDM aparatur negara lingkup Kementerian Dalam Negeri, dalam hal pola pikir, budaya kerja, dan kinerja 4. Kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan daerah | 1. Peran KDH dan WKDH dalam penyelenggaraan pemerintahan 2. Harapan masyarakat mengenai pelayanan publik 3. Aspek SDM aparatur negara lingkup Pemerintah Daerah dalam hal pola pikir, budaya kerja, dan kinerja 4. Peran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terkait penerapan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan | 5. Aspek akuntabilitas kinerja, berupa perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja 6. Aspek pelayanan publik berupa indikator kepuasan stakeholder yang belum 7. Aspek tata laksana berupa implementasi SOP yang masih kurang, e-Government yang belum optimal, serta sinkronisasi data dan informasi kepegawaian |



| ASPEK CAPAIAN | CAPAIAN/KONDISI SAAT INI | STANDAR YANG DIGUNAKAN | FAKTOR YANG MEMPENGARUHI | | PERMASALAHAN PELAYANAN BKPSDM KABUPATEN WAJO |
|---|---|---------------------------------|---|--|--|
| | | | INTERNAL (KEWENANGAN) | EKSTERNAL (DI LUAR KEWENANGAN) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Kajian terhadap Renstra Kementerian PANRB | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik yang diwujudkan dengan penurunan tingkat korupsi, perbaikan pelayanan publik, dan peningkatan akuntabilitas pemerintah 2. Pelaksanaan reformasi birokrasi 3. Pencapaian prioritas kementerian melalui perumusan kebijakan dibidang PAN dan RB, penataan aparatur yang kompeten dan kompetitif, penerapan kebijakan promosi terbuka, penerapan standar kinerja individu, dan penetapan jabatan fungsional baru 4. Pemerintah yang terbuka dan melayani melalui efektivitas pelaksanaan RB, kategori baik pada pelayanan publik, dan perolehan skor indeks kepuasan masyarakat (IKM) 5. Aparatur yang bersih, bebas KKN dan akuntabel yang terindikasi melalui peningkatan nilai rata-rata indeks integritas, penurunan pelanggaran disiplin dan etika PNS, dan peningkatan skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) | Capaian kinerja tahun 2010-2014 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas kebijakan atau regulasi 2. Pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan tata kelola dan pelayanan publik yang berkualitas 2. Implementasi kebijakan atau regulasi 3. Kualitas birokrasi pemerintah daerah dalam hal profesionalitas dan integritas SDM | |
| Kajian terhadap Renstra BKN | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan PNS dengan fasilitasi IP untuk melakukan penghitungan jumlah kebutuhan PNS yang tepat berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan, serta pendistribusian pegawai dan penyusunan proyeksi kebutuhan PNS selama 5 tahun | Capaian kinerja tahun 2010-2014 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas sumber daya manusia aparatur lingkup BKN | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas sumber daya manusia aparatur pada IP atau pemerintah daerah | |



| ASPEK CAPAIAN | CAPAIAN/KONDISI SAAT INI | STANDAR YANG DIGUNAKAN | FAKTOR YANG MEMPENGARUHI | | PERMASALAHAN PELAYANAN BKPSDM KABUPATEN WAJO |
|---------------|---|------------------------|--|---|--|
| | | | INTERNAL (KEWENANGAN) | EKSTERNAL (DI LUAR KEWENANGAN) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | <p>2. Pembangunan dan pengembangan sistem rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi dengan CAT, serta penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) pada instansi pusat dan daerah</p> <p>3. Peningkatan mutu pelayanan kepegawaian melalui penerapan standar manajemen mutu ISO 9001-2008 dan SAPK online yang terintegrasi</p> <p>4. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi melalui penerapan SAPK dan digitalisasi tata naskah kepegawaian dengan <i>Document Management System</i> (DMS)</p> <p>5. Perumusan kebijakan pengawasan dan pengendalian, serta pelaksanaan tindakan korektif terhadap pelanggaran peraturan kepegawaian dan sosialisasi /bimbingan teknis peraturan perundang-undangan kepada seluruh IP</p> | | <p>2. Sarana dan prasarana kepegawaian</p> <p>3. Ketersediaan data PNS yang ada pada IP</p> <p>4. Pengawasan dan pembinaan kepegawaian</p> | <p>2. Peran IP pusat maupun pemerintah daerah dalam penerapan NSPK</p> <p>3. Partisipasi IP dalam tata kelola kepegawaian di kabupaten/kota</p> | |



TABEL 2.4.
FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG PELAYANAN SKPD
TERHADAP PENCAPAIAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Nama OPD : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo

| VISI : KABUPATEN WAJO YANG BERKARAKTER RELIGIUS, PRODUKTIF, UNGGUL, SEJAHTERA DAN AMAN | | | | |
|--|---|---|--|---|
| NO. | MISI DAN PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH | PERMASALAHAN PELAYANAN BKPSDM KABUPATEN WAJO | FAKTOR | |
| | | | PENGHAMBAT | PENDORONG |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Misi I : Mengembangkan kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter relegius untuk mampu bersaing secara regional dan nasional. | Tidak berkorelasi langsung dengan tugas dan fungsi BKPSDM | -- | -- |
| 2. | Misi II : Meningkatkan akselerasi pembangunan infra-struktur dalam mendukung pengembangan pusat-pusat produksi pertanian dan pemasaran komoditas unggulan untuk percepatan kesejahteraan masyarakat. | Tidak berkorelasi langsung dengan tugas dan fungsi BKPSDM | -- | -- |
| 3. | Misi III : Menciptakan kondisi yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat sehingga dapat mendorong peningkatan pendapatan rakyat dan daerah. | Tidak berkorelasi langsung dengan tugas dan fungsi BKPSDM | -- | -- |
| 4. | Misi IV : Mengembangkan sistem perencanaan yang partisipatif untuk mendukung kebijakan pembangunan berorientasi lingkungan hidup berbasis persediaan dan perkotaan. | Tidak berkorelasi langsung dengan tugas dan fungsi BKPSDM | -- | -- |
| 5. | Misi V : Meningkatkan kualitas tatanan kehidupan yang relegius, Demokratis dan berkeadilan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tenteram. | Tidak berkorelasi langsung dengan tugas dan fungsi BKPSDM | -- | -- |
| 6. | Misi VI : Meningkatkan kapasitas aparat dan kapabilitas kelembagaan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk melaksanakan pelayanan publik yang berkualitas. Program : Peningkatan Kapasitas Aparat dan Kelembagaan Pemerintahan Daerah | Sistem pembinaan dan pengembangan ASN yang belum terintegrasi berbasis teknologi dan informasi. | Infrastruktur jaringan telekomunikasi yang belum memadai. | Pelaksanaan sosialisasi dan kunjungan asistensi ke unit kerja |
| | | Belum optimalnya pelaksanaan diklat struktural, diklat teknis dan diklat fungsional sehingga aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya belum optimal karena kompetensi yang dimilikinya kurang memadai untuk tugas jabatannya. | Terbatasnya anggaran peningkatan kapasitas sumber daya aparatur serta minimnya sarana dan parasarana kediklatan. | Optimalisasi penggunaan anggaran yang tersedia dengan skala prioritas serta dukungan teknis dari lembaga diklat yang terakreditasi. |



Tabel 2.5.
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2019
KABUPATEN WAJO

Nama OPD : **BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM KAB. WAJO**

| NO. | RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2019 | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|-----|--|--|---|----------------|----------------------|--|--|---|----------------|----------------------|-----------------|
| | PROGRAM/ KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF (Rp.) | PROGRAM/ KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | KEBUTUHAN DANA (Rp.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Persen) | 100 | 1.672.412.000 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Persen) | 100 | 1.838.805.300 | |
| 1 | Penyediaan jasa surat menyurat | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Waktu penyediaan jasa surat menyurat | 12 Bulan | 208.147.000 | Penyediaan jasa surat menyurat | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Waktu penyediaan jasa surat menyurat | 12 Bulan | 220.700.000 | |
| 2 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 12 Bulan | 529.000.000 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 12 Bulan | 557.515.300 | |
| 3 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Waktu penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional | 12 Bulan | 10.000.000 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Waktu penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional | 12 Bulan | 10.000.000 | |
| 4 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan | 12 Bulan | 60.400.000 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan | 12 Bulan | 62.640.000 | |
| 5 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor | 12 Bulan | 17.000.000 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor | 12 Bulan | 17.000.000 | |
| 6 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Waktu penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | 12 Bulan | 42.200.000 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Waktu penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | 12 Bulan | 42.200.000 | |
| 7 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 12 Bulan | 10.000.000 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 12 Bulan | 20.000.000 | |
| 8 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 12 Bulan | 15.000.000 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 12 Bulan | 15.000.000 | |
| 9 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Waktu penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 12 Bulan | 645.665.000 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Waktu penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 12 Bulan | 683.110.000 | |
| 10 | Penyediaan jasa administrasi kepegawaian | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Waktu penyediaan jasa administrasi kepegawaian | 12 Bulan | 135.000.000 | Penyediaan jasa administrasi kepegawaian | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Waktu penyediaan jasa administrasi kepegawaian | 12 Bulan | 210.640.000 | |



| NO. | RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2019 | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING | | |
|-----|---|--|--|---|----------------------|---|--------|--|--|----------------------|-----------------|--|--|
| | PROGRAM/ KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF (Rp.) | PROGRAM/ KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | KEBUTUHAN DANA (Rp.) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| II | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur (Persen) | 100 | 275.000.000 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur (Persen) | 100 | 120.000.000 | | | |
| 1 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor | 1 Unit Proyektor | 50.000.000 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | | Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor | 0 | - | | | |
| 2 | Pengadaan peralatan gedung kantor | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor | 6 Unit Laptop 1 Unit Printer | 25.000.000 | Pengadaan peralatan gedung kantor | | Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor | 0 0 | - | | | |
| 3 | Pengadaan meubeleu | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Jumlah pengadaan meubeleu | 20 Unit Meja kerja 50 Unit Kursi kerja | 50.000.000 | Pengadaan meubeleu | | Jumlah pengadaan meubeleu | 0 Unit Meja kerja 50 Unit Kursi kerja | 20.000.000 | | | |
| 4 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala | 1 Gedung | 25.000.000 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | | Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala | 1 Gedung | 25.000.000 | | | |
| 5 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan/ dinas operasional | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Waktu pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 12 Bulan | 75.000.000 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan/ dinas operasional | | Waktu pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 12 Bulan | 75.000.000 | | | |
| 6 | Rehabilitasi Sedang/ berat gedung kantor | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Jumlah ruang kantor yang direhabilitasi | 2 Ruangan | 50.000.000 | Rehabilitasi Sedang/ berat gedung kantor | | Jumlah ruang kantor yang direhabilitasi | 2 Ruangan | - | | | |
| III | Program Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan | | Penilaian LAKIP oleh Inspektorat | 85 | 34.575.000 | Program Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan | | Penilaian LAKIP oleh Inspektorat | 85 | 26.575.000 | | | |
| | | | Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan | 100 | | | | | Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan | | 100 | | |
| | | | Persentase temuan pengelolaan keuangan oleh Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti | 100 | | | | | Persentase temuan pengelolaan keuangan oleh Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti | | 100 | | |
| 1 | Penyusunan Renja SKPD | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Jumlah dokumen RKPd yang disusun | 1 Dokumen | 6.275.000 | Penyusunan RKPd SKPD | | Jumlah dokumen RKPd yang disusun | 2 Dokumen | 5.925.000 | | | |
| 2 | Penyusunan LAKIP SKPD | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Jumlah dokumen LAKIP yang disusun | 1 Laporan | 6.750.000 | Penyusunan LAKIP SKPD | | Jumlah dokumen LAKIP yang disusun | 1 Laporan | 6.750.000 | | | |



| NO. | RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2019 | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|-----------|--|--|--|----------------|----------------------|--|--|--|----------------|----------------------|-----------------|
| | PROGRAM/ KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF (Rp.) | PROGRAM/ KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | KEBUTUHAN DANA (Rp.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | Penyusunan Renstra/ Revisi Renstra SKPD | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Jumlah dokumen Renstra/ Revisi Renstra SKPD | 1 Dokumen | 7.000.000 | Penyusunan Renstra/ Revisi Renstra SKPD | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Jumlah dokumen Renstra/ Revisi Renstra SKPD | 1 Dokumen | 7.000.000 | |
| 4 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun | 1 Laporan | 7.900.000 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun | 1 Laporan | 6.900.000 | |
| 5 | Asistensi penyusunan RKA Pokok dan Perubahan | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Jumlah dokumen RKA yang diasistensi | 2 Dokumen | 6.650.000 | Asistensi penyusunan RKA Pokok dan Perubahan | | Jumlah dokumen RKA yang diasistensi | 2 Dokumen | 0 | |
| IV | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | | Persentase ASN yang meningkat kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan (Persen) | 100 | 1.841.697.000 | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | | Persentase ASN yang meningkat kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan (Persen) | 100 | 1.019.510.200 | |
| 1 | Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi Calon PNS Daerah | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Jumlah CPNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan dengan predikat BAIK | 300 Orang | 190.000.000 | Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi Calon PNS Daerah | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Jumlah CPNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan dengan predikat BAIK | 100 Orang | 435.230.000 | |
| 2 | Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Jumlah PNS Daerah yang telah mengikuti Diklat PIM II dengan predikat BAIK | 5 Orang | 1.042.418.000 | Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Jumlah PNS Daerah yang telah mengikuti Diklat PIM II dengan predikat BAIK | 4 Orang | 121.044.000 | |
| | | Jumlah PNS Daerah yang telah mengikuti Diklat PIM III dengan predikat BAIK | 10 Orang | | | | | 0 | | | |
| | | Jumlah PNS Daerah yang telah mengikuti Diklat PIM IV dengan predikat BAIK | 25 Orang | | | | | 0 | | | |
| 1 | Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Jumlah PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi dengan predikat predikat BAIK | 200 Orang | 152.000.000 | Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Jumlah PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi dengan predikat predikat BAIK | 0 | 0 | |
| 2 | Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Jumlah PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional dengan predikat Baik | 242 Orang | 150.000.000 | Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Jumlah PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional dengan predikat Baik | 17 | 162.500.000 | |
| 3 | Pendidikan formal | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Jumlah ASN yang menempuh pendidikan formal | 6 Orang | 120.000.000 | Pendidikan formal | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Jumlah ASN yang menempuh pendidikan formal | 1 Orang | 20.000.000 | |
| 4 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Jumlah PNS yang telah mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | 40 Orang | 137.279.000 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Jumlah PNS yang telah mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | 50 Orang | 280.736.200 | |
| 5 | Bimbingan teknis aplikasi e-Kinerja | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Jumlah PNS yang telah mengikuti bimbingan teknis aplikasi e-Kinerja | 53 Orang | 50.000.000 | Bimbingan teknis aplikasi e-Kinerja | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Jumlah PNS yang telah mengikuti bimbingan teknis aplikasi e-Kinerja | 0 | - | |



| NO. | RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2019 | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|-----|---|--|--|----------------|----------------------|---|--|--|----------------|----------------------|-----------------|
| | PROGRAM/ KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF (Rp.) | PROGRAM/ KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | KEBUTUHAN DANA (Rp.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Program pembinaan dan pengembangan aparatur | | Persentase ASN yang mengisi jabatan sesuai standar kompetensi (Persen) | 85 | 1.396.564.000 | Program pembinaan dan pengembangan aparatur | | Persentase ASN yang mengisi jabatan sesuai standar kompetensi (Persen) | 85 | 1.289.131.500 | |
| 1 | Analisis kebutuhan diklat, monitoring dan evaluasi hasil diklat | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Jumlah dokumen analisis kebutuhan diklat, monitoring dan evaluasi hasil diklat | 2 Dokumen | 50.000.000 | Analisis kebutuhan diklat, monitoring dan evaluasi hasil diklat | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Jumlah dokumen analisis kebutuhan diklat, monitoring dan evaluasi hasil diklat | 2 Dokumen | 126.260.000 | |
| 2 | Seleksi penerimaan CPNS | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Jumlah peserta yang lulus dalam seleksi penerimaan Calon PNS | 100 Orang | 400.000.000 | Seleksi penerimaan CPNS | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Jumlah peserta yang lulus dalam seleksi penerimaan Calon PNS | 100 Orang | 400.000.000 | |
| 3 | Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat PNS | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Jumlah PNS yang menerima SK kenaikan pangkat tepat waktu | 1084 Orang | 308.000.000 | Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat PNS | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Jumlah PNS yang menerima SK kenaikan pangkat tepat waktu | 1084 Orang | 268.190.000 | |
| | | | Jumlah PNS yang menerima kenaikan gaji berkala tepat waktu | 222 Orang | | | | Jumlah PNS yang menerima kenaikan gaji berkala tepat waktu | 222 Orang | | |
| 4 | Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan ujian dinas | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Jumlah PNS yang lulus ujian | 5 Orang | 98.000.000 | Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan ujian dinas | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Jumlah PNS yang lulus ujian | 5 Orang | 29.400.000 | |
| | | | Jumlah PNS yang lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah | 50 Orang | | | | Jumlah PNS yang lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah | 50 Orang | | |
| 5 | Seleksi promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Jumlah penyelenggaraan seleksi promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas | 1 Kali | 367.564.000 | Seleksi promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Jumlah penyelenggaraan seleksi promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas | 1 Kali | 374.974.000 | |
| 6 | Penempatan jabatan pelaksana dan jabatan fungsional | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Jumlah penempatan jabatan pelaksana dan jabatan fungsional | 600 SK | 23.000.000 | Penempatan jabatan pelaksana dan jabatan fungsional | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Jumlah penempatan jabatan pelaksana dan jabatan fungsional | 600 SK | 55.407.500 | |
| 7 | Pengambilan sumpah jabatan/ pelantikan pejabat JPT, administrator dan pengawas | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Jumlah pengambilan sumpah jabatan/ pelantikan pejabat JPT, administrator dan pengawas | 6 Kali | 150.000.000 | Pengambilan sumpah jabatan/ pelantikan pejabat JPT, administrator dan pengawas | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Jumlah pengambilan sumpah jabatan/ pelantikan pejabat JPT, administrator dan pengawas | 4 Kali | 34.900.000 | |
| | Program pembinaan dan pengembangan aparatur | | Persentase tingkat kedisiplinan ASN (Persen) | 100 | 973.862.000 | Program pembinaan dan pengembangan aparatur | | Persentase tingkat kedisiplinan ASN (Persen) | 100 | 750.798.000 | |
| 1 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan kehadiran PNS | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Jumlah PNS yang memperoleh monitoring dan evaluasi penegakan disiplin | 6.146 Orang | 75.000.000 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan kehadiran PNS | | Jumlah PNS yang memperoleh monitoring dan evaluasi penegakan disiplin | 6.146 Orang | 17.500.000 | |
| 2 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja PNS | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Jumlah PNS yang memperoleh monitoring dan evaluasi pelaporan kinerja | 6.146 Orang | 80.000.000 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja PNS | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Jumlah PNS yang memperoleh monitoring dan evaluasi pelaporan kinerja | 6.146 Orang | 127.000.000 | |
| 3 | Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai berbasis e-Kinerja | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu | Jumlah ASN yang telah menyusun Sasaran Kerja Pegawai berbasis e-Kinerja | 6.146 Orang | 50.000.000 | Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai berbasis e-Kinerja | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Jumlah ASN yang telah menyusun Sasaran Kerja Pegawai berbasis e-Kinerja tepat waktu | 6.146 Orang | 30.000.000 | |



| NO. | RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2019 | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|-----|---|--|---|----------------|----------------------|---|--|---|----------------|----------------------|-----------------|
| | PROGRAM/ KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF (Rp.) | PROGRAM/ KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | KEBUTUHAN DANA (Rp.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4 | Penilaian Sasaran Kerja Pegawai berbasis e-Kinerja | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Jumlah ASN yang telah memperoleh P2KPNS berbasis e-Kinerja | 6.146 Orang | 110.000.000 | Penilaian Sasaran Kerja Pegawai berbasis e-Kinerja | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Jumlah ASN yang telah memperoleh P2KPNS berbasis e-Kinerja | 0 | - | |
| 5 | Asistensi dan evaluasi penyelesaian LP2P | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Jumlah ASN yang telah menyelesaikan LP2P tepat waktu | 5246 Orang | 73.400.000 | Asistensi dan evaluasi penyelesaian LP2P | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Jumlah ASN yang telah menyelesaikan LP2P tepat waktu | 5246 Orang | 92.400.000 | |
| 6 | Asistensi, monitoring dan evaluasi penyelesaian LHKPN dan LHKASN | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Jumlah ASN yang telah melaporkan LHKPN tepat waktu | 132 Orang | 81.089.000 | Asistensi, monitoring dan evaluasi penyelesaian LHKPN dan LHKASN | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Jumlah ASN yang telah melaporkan LHKPN tepat waktu | 132 Orang | 68.240.000 | |
| | | | Jumlah ASN yang telah melaporkan LHKASN tepat waktu | 270 Orang | | | | Jumlah ASN yang telah melaporkan LHKASN tepat waktu | 270 Orang | | |
| 7 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan proses akademik PNS Tugas Belajar dan Izin Belajar | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Jumlah PNS Tugas Belajar yang menyelesaikan proses akademik tepat waktu | 3 Orang | 75.000.000 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan proses akademik PNS Tugas Belajar dan Izin Belajar | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Jumlah PNS Tugas Belajar yang menyelesaikan proses akademik tepat waktu | 9 Orang | 0 | |
| | | | Jumlah PNS yang memperoleh Izin Belajar | 75 Orang | | | | Jumlah PNS yang memperoleh Izin Belajar | 270 Surat | | |
| 8 | Penyelenggaraan sidang Majelis Pertimbangan Kepegawaian | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Jumlah PNS yang menjalani sidang Majelis Pertimbangan Kepegawaian | 2 Orang | 123.900.000 | Penyelenggaraan sidang Majelis Pertimbangan Kepegawaian | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Jumlah PNS yang menjalani sidang Majelis Pertimbangan Kepegawaian | 2 Orang | 8.000.000 | |
| 9 | Pemberian penghargaan dan pelepasan Pensiun PNS | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Jumlah PNS yang menerima Kartu Peserta Taspen tepat waktu | 50 Orang | 241.265.000 | Pemberian penghargaan dan pelepasan Pensiun PNS | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Jumlah PNS yang menerima Kartu Peserta Taspen tepat waktu | 50 Orang | 343.450.000 | |
| | | | Jumlah PNS yang memperoleh hak pensiun tepat waktu | 180 Orang | | | | Jumlah PNS yang memperoleh hak pensiun tepat waktu | 180 Orang | | |
| | | | Jumlah Pensiun PNS yang menerima penghargaan dan pelepasan pensiun | 168 Orang | | | | Jumlah Pensiun PNS yang menerima penghargaan dan pelepasan pensiun | 179 Orang | | |
| 10 | Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Jumlah PNS berprestasi yang memperoleh penghargaan | 400 Orang | 64.208.000 | Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Jumlah PNS berprestasi yang memperoleh penghargaan | 400 Orang | 64.208.000 | |



| NO. | RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2019 | | | | | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING | |
|-----|--|--|---|--|----------------------|--|--|---|--|----------------------|----------------------|--|
| | PROGRAM/ KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF (Rp.) | PROGRAM/ KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | KEBUTUHAN DANA (Rp.) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | Program penataan sistem informasi manajemen | | Persentase ASN yang datanya akurat | 2 | 244.120.000 | Program penataan sistem informasi manajemen | | Persentase ASN yang datanya akurat | 2 | 336.380.000 | | |
| 1 | Pembangunan/ pengembangan SIMPEG/ SAPK | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Jumlah pembangunan/ pengembangan SIMPEG/SAPK Waktu pengelolaan dan pemeliharaan dokumen dan <u>arsip kepegawaian</u> Jumlah ASN yang memperoleh Kartu pegawai tepat waktu Jumlah ASN yang memperoleh Karis/Karsu tepat waktu | 2 Aplikasi 12 Bulan 75 Orang 70 Orang | 179.120.000 | Pembangunan/ pengembangan SIMPEG/ SAPK | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Jumlah pembangunan/ pengembangan SIMPEG/SAPK Waktu pengelolaan dan pemeliharaan dokumen dan <u>arsip kepegawaian</u> Jumlah ASN yang memperoleh Kartu pegawai tepat waktu Jumlah ASN yang memperoleh Karis/Karsu tepat waktu | 2 Aplikasi 12 Bulan 75 Orang 70 Orang | 260.500.000 | | |
| | Penyusunan formasi dan pengolahan e-formasi ASN | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Jumlah dokumen penyusunan formasi dan pengolahan e-formasi ASN | 1 Dokumen | 65.000.000 | Penyusunan formasi dan pengolahan e-formasi ASN | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Jumlah dokumen penyusunan formasi dan pengolahan e-formasi ASN | 1 Dokumen | 75.880.000 | | |
| | | | | | 6.438.230.000 | | | | | | 5.381.200.000 | |



Tabel 2.6.
RUMUSAN KEBUTUHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019
HASIL REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
KABUPATEN WAJO

Nama OPD : **BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM KAB. WAJO**

| NO. | PROGRAM/ KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | KEBUTUHAN DANA (Rp.) | SUMBER DANA | CATATAN |
|------------|--|---|--|------------------------------------|----------------------|-------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Persen) | 100 | 1.838.805.300 | | |
| 1 | Penyediaan jasa surat menyurat | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Waktu penyediaan jasa surat menyurat | 12 Bulan | 220.700.000 | APBD | |
| 2 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 12 Bulan | 557.515.300 | APBD | |
| 3 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Waktu penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 12 Bulan | 10.000.000 | APBD | |
| 4 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan | 12 Bulan | 62.640.000 | APBD | |
| 5 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor | 12 Bulan | 17.000.000 | APBD | |
| 6 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Waktu penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | 12 Bulan | 42.200.000 | APBD | |
| 7 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 12 Bulan | 20.000.000 | APBD | |
| 8 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 12 Bulan | 15.000.000 | APBD | |
| 9 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Waktu penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 12 Bulan | 683.110.000 | APBD | |
| 10 | Penyediaan jasa administrasi kepegawaian | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Waktu penyediaan jasa administrasi kepegawaian | 12 Bulan | 210.640.000 | APBD | |
| II | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur (Persen) | 100 | 120.000.000 | | |
| 1 | Pengadaan meubeleu | | Jumlah pengadaan meubeleu | 0 Unit Meja 50 Unit Kursi kerja | 20.000.000 | APBD | |
| 2 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala | 1 Gedung | 25.000.000 | APBD | |
| 3 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan/ dinas operasional | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Waktu pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 12 Bulan | 75.000.000 | APBD | |
| 4 | Rehabilitasi Sedang/ berat gedung kantor | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Jumlah ruang kantor yang direhabilitasi | 2 Ruangan | - | APBD | |
| III | Program Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan | | Penilaian LAKIP oleh Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan | 85 100 | 26.575.000 | | |
| | | Persentase temuan pengelolaan keuangan oleh Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti | 100 | | | | |
| 1 | Penyusunan Renja SKPD | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B | Jumlah dokumen RKPD yang disusun | 2 Dokumen | | 5.925.000 | APBD |
| 2 | Penyusunan LAKIP SKPD | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu | Jumlah dokumen LAKIP yang disusun | 1 Laporan | 6.750.000 | APBD | |
| 3 | Penyusunan Renstra/ Revisi Renstra SKPD | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Jumlah dokumen Renstra/ Revisi Renstra SKPD | 1 Dokumen | 7.000.000 | APBD | |



| NO. | PROGRAM/ KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | KEBUTUHAN DANA (Rp.) | SUMBER DANA | CATATAN |
|-----------|---|--|--|----------------|----------------------|-------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun | 1 Laporan | 6.900.000 | APBD | |
| IV | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | | Persentase ASN yang meningkat kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan (Persen) | 100 | 1.019.510.200 | | |
| 1 | Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi Calon PNS Daerah | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Jumlah CPNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan dengan predikat BAIK | 100 Orang | 435.230.000 | APBD | |
| 2 | Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Jumlah PNS Daerah yang telah mengikuti Diklat PIM II dengan predikat BAIK | 4 Orang | 121.044.000 | APBD | |
| | | | Jumlah PNS Daerah yang telah mengikuti Diklat PIM III dengan predikat BAIK | 0 | | | |
| | | | Jumlah PNS Daerah yang telah mengikuti Diklat PIM IV dengan predikat BAIK | 0 | | | |
| 4 | Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Jumlah PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional dengan predikat Baik | 17 | 162.500.000 | APBD | |
| 5 | Pendidikan formal | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Jumlah ASN yang menempuh pendidikan formal | 1 Orang | 20.000.000 | APBD | |
| 6 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Jumlah PNS yang telah mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | 50 Orang | 280.736.200 | APBD | |
| V | Program pembinaan dan pengembangan aparatur | | Persentase ASN yang mengisi jabatan sesuai standar kompetensi (Persen) | 85 | 1.289.131.500 | | |
| 1 | Analisis kebutuhan diklat, monitoring dan evaluasi hasil diklat | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Jumlah dokumen analisis kebutuhan diklat, monitoring dan evaluasi hasil diklat | 2 Dokumen | 126.260.000 | APBD | |
| 2 | Seleksi penerimaan CPNS | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Jumlah peserta yang lulus dalam seleksi penerimaan Calon PNS | 100 Orang | 400.000.000 | APBD | |
| 3 | Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat PNS | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Jumlah PNS yang menerima SK kenaikan pangkat tepat waktu | 1084 Orang | 268.190.000 | APBD | |
| | | | Jumlah PNS yang menerima kenaikan gaji berkala tepat waktu | 222 Orang | | | |
| 4 | Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan ujian dinas | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Jumlah PNS yang lulus | 5 Orang | 29.400.000 | APBD | |
| | | | Jumlah PNS yang lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah | 50 Orang | | | |
| 5 | Seleksi promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Jumlah penyelenggaraan seleksi promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas | 1 Kali | 374.974.000 | APBD | |
| 6 | Penempatan jabatan pelaksana dan jabatan fungsional | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Jumlah penempatan jabatan pelaksana dan jabatan fungsional | 600 SK | 55.407.500 | APBD | |
| 7 | Pengambilan sumpah jabatan/ pelantikan pejabat JPT, administrator dan pengawas | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Jumlah pengambilan sumpah jabatan/ pelantikan pejabat JPT, administrator dan pengawas | 4 Kali | 34.900.000 | APBD | |
| V | Program pembinaan dan pengembangan aparatur | | Persentase tingkat kedisiplinan ASN (Persen) | 100 | 750.798.000 | | |
| 1 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan kehadiran PNS | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Jumlah PNS yang memperoleh monitoring dan evaluasi penegakan disiplin | 6.146 Orang | 17.500.000 | APBD | |
| 2 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja PNS | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Jumlah PNS yang memperoleh monitoring dan evaluasi pelaporan kinerja | 6.146 Orang | 127.000.000 | APBD | |
| 3 | Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai berbasis e-Kinerja | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Jumlah ASN yang telah menyusun Sasaran Kerja Pegawai berbasis e-Kinerja tepat waktu | 6.146 Orang | 30.000.000 | APBD | |



| NO. | PROGRAM/ KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | KEBUTUHAN DANA (Rp.) | SUMBER DANA | CATATAN |
|--------------|--|--|--|----------------|----------------------|-------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | Asistensi dan evaluasi penyelesaian LP2P | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Jumlah ASN yang telah menyelesaikan LP2P tepat waktu | 5246 Orang | 92.400.000 | APBD | |
| 5 | Asistensi, monitoring dan evaluasi penyelesaian LHKPN dan LHKASN | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Jumlah ASN yang telah melaporkan LHKPN tepat waktu | 132 Orang | 68.240.000 | APBD | |
| | | | Jumlah ASN yang telah melaporkan LHKASN tepat waktu | 270 Orang | | | |
| 6 | Penyelenggaraan sidang Majelis Pertimbangan Kepegawaian | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Jumlah PNS yang menjalani sidang Majelis Pertimbangan Kepegawaian | 2 Orang | 8.000.000 | APBD | |
| 7 | Pemberian penghargaan dan pelepasan Pensiun PNS | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Jumlah PNS yang menerima Kartu Peserta Taspen tepat waktu | 50 Orang | 343.450.000 | APBD | |
| | | | Jumlah PNS yang memperoleh hak pensiun tepat waktu | 180 Orang | | | |
| | | | Jumlah Pensiun PNS yang menerima penghargaan dan pelepasan pensiun | 179 Orang | | | |
| 8 | Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Jumlah PNS berprestasi yang memperoleh penghargaan | 400 Orang | 64.208.000 | APBD | |
| VI | Program penataan sistem informasi manajemen | | Persentase ASN yang datanya akurat | 100 | 336.380.000 | | |
| 1 | Pembangunan/ pengembangan SIMPEG/ SAPK | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Jumlah pembangunan/ pengembangan SIMPEG/ SAPK | 2 Aplikasi | 260.500.000 | APBD | |
| | | | Waktu pengelolaan dan pemeliharaan dokumen dan arsip kepegawaian | 12 Bulan | | | |
| | | | Jumlah ASN yang memperoleh Kartu pegawai | 75 Orang | | | |
| | | | Jumlah ASN yang memperoleh Karis/ Karsu tepat waktu | 70 Orang | | | |
| 2 | Penyusunan formasi dan pengolahan e-formasi ASN | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Jumlah dokumen penyusunan formasi dan pengolahan e-formasi ASN | 1 Dokumen | 75.880.000 | APBD | |
| TOTAL | | | | | 5.381.200.000 | | |



2.5. Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKPSDM Kabupaten Wajo sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Bupati Nomor 79 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, rincian tugas dan fungsi serta tata kerja lingkup pemerintah daerah Kabupaten Wajo bahwa BKPSDM mempunyai kewenangan dalam bidang pengelolaan kepegawaian, sehingga tidak serta merta bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Berdasarkan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2018 di kecamatan, para pemangku kepentingan mengajukan beberapa usulan yang terkait dengan peningkatan pelayanan masyarakat dan peningkatan kualitas pendidikan. Pemangku kepentingan di Kecamatan Gilireng mengusulkan untuk pengadaan empat orang guru pada SMP Negeri 1 Gilireng. Pemangku kepentingan di Kecamatan Penrang juga mengusulkan pengadaan beberapa jabatan dalam bidang kesehatan yang menysasar pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat (lihat Tabel 2.7).

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang terkait dengan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan tidak muncul dalam Musrenbang RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2018 (lihat Tabel 2.8). Hal ini dimungkinkan terjadi karena BKPSDM Kabupaten Wajo hanya bersentuhan langsung dengan ASN. Adapun hasil masukan-masukan dari pemangku kepentingan diurut berdasarkan kriteria prioritas yang telah ditetapkan oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Wajo sesuai Tabel 2.9. Setelah diperoleh kesepakatan maka dilakukan penggabungan dengan Rancangan Renja BKPSDM Kabupaten Wajo yang telah disusun sebagaimana yang tercantum pada Tabel 2.10.

Tabel 2.7.
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
TAHUN 2019 KABUPATEN WAJO

Nama OPD : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo

| NO. | PROGRAM / KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | BESARAN / VOLUME | CATATAN |
|-----|---|--|--|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| V | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | | Persentase ASN yang mengisi jabatan sesuai standar kompetensi (Persen) | | |
| 1 | Seleksi penerimaan CPNS | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Jumlah peserta yang lulus dalam seleksi penerimaan Calon PNS | 5 Orang 4 Orang | Usulan dari UPTD Puskesmas Penrang Usulan dari SMP Negeri se-Kecamatan Gilireng |



Tabel 2.8.
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI MASYARAKAT
TAHUN 2019 KABUPATEN WAJO

Nama OPD : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo

| NO. | PROGRAM / KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | BESARAN / VOLUME | CATATAN |
|-----|--------------------|--------|-------------------|------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

TABEL 2.9.
PEMERINGKATAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN USULAN MASYARAKAT
DAN HASIL MUSRENBANG KECAMATAN
KABUPATEN WAJO

| NO. | KEGIATAN | KRITERIA | | | | | Total Skor | Urutan Prioritas |
|-----|-------------------------|--|----------------------------|---|--|-----------|------------|------------------|
| | | Kesesuaian dengan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Wajo | Mempercepat Pencapaian SPM | Dukungan pada Pemenuhan Hak Dasar Rakyat lintas Kecamatan | Dukungan Nilai Tambah lintas Kecamatan | Lain-lain | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Seleksi penerimaan CPNS | 30 | 30 | --- | --- | --- | 60 | 1 |

3



Tabel 2.10.
PENGGABUNGAN PRIORITAS MASUKAN MASYARAKAT DENGAN
RANCANGAN RENJA OPD KABUPATEN WAJO

Nama OPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM KAB. WAJO

| RANCANGAN RENJA | | | | | | HASIL PRIORITAS MASUKAN MASYARAKAT | | | | | CATATAN PENTING |
|-----------------|---|--|--|----------------|----------------------|---|--|--|----------------|----------------------|--|
| NO. | PROGRAM/ KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF (Rp.) | PROGRAM/ KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET CAPAIAN | KEBUTUHAN DANA (Rp.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| V | Program pembinaan dan pengembangan aparatur | | Persentase ASN yang mengisi jabatan sesuai standar kompetensi (Persen) | 85 | 1.289.131.500 | Program pembinaan dan pengembangan aparatur | | Persentase ASN yang mengisi jabatan sesuai standar kompetensi (Persen) | 85 | 1.289.131.500 | |
| 2 | Seleksi penerimaan CPNS | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Jumlah peserta yang lulus dalam seleksi penerimaan Calon PNS | 100 Orang | 400.000.000 | Seleksi penerimaan CPNS | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | Jumlah peserta yang lulus dalam seleksi penerimaan Calon PNS | 409 | 400.000.000 | Target capaian berdasarkan dengan jumlah formasi dari Menpan-RB Tahun 2018 |



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional yang terkait dengan sasaran makro Pembangunan dan prioritas pembangunan pada pemerintah daerah adalah telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2017 tentang Aparatur Sipil Negara dimana kebijakan nasional mengarah pada kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada sistem merit. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan sistemik. Dalam hal ini, seluruh ASN memiliki kesempatan yang sama untuk menunjukkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja untuk menunjukkan profesionalitas ASN.

Telaah atau reviu telah dilakukan terhadap kebijakan nasional maupun provinsi berupa Renstra K/L maupun Renstra Provinsi yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi BKPSDM Kabupaten Wajo selaku pelaksana dalam urusan kepegawaian. Adapun Renstra KL dalam hal ini adalah Renstra Kementerian Dalam Negeri, Renstra Kementerian PANRB, dan BKN. Renstra Provinsi dalam hal ini adalah Renstra BKPSDM Provinsi Sulawesi Selatan dan Renstra Badan Diklat Provinsi Sulawesi Selatan. Telaah tersebut menjadi informasi dalam mengidentifikasi kebijakan nasional dan provinsi berdasarkan tugas pokok dan fungsi (*lihat* Tabel 3.1).

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM Kabupaten Wajo

Tujuan dan sasaran terkait dengan sasaran Revisi Renstra BKPSDM Kabupaten Wajo Tahun 2014-2019. Tujuan Renja Tahun 2019 BKPSDM Kabupaten Wajo adalah :

1. Terpenuhinya penempatan aparatur sipil negara dalam jabatan sesuai dengan kompetensi
2. Terpenuhinya hak dan kewajiban aparatur sipil negara secara cepat, tepat dan akurat
3. Peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran Renja Tahun 2019 BKPSDM Kabupaten Wajo adalah target atau hasil yang diharapkan dari program-program atau keluaran yang diharapkan dari kegiatan selama satu tahun. Sasaran Renja Tahun 2019 BKPSDM Kabupaten Wajo disusun berdasarkan sasaran jangka menengah yang termuat dalam Revisi Renstra Tahun 2014-2019, dimana masing-masing sasaran dijabarkan ke dalam indikator-indikator sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya kompetensi ASN, dengan indikator berupa persentase ASN yang meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan;



2. Tersedianya ASN yang memenuhi standar kompetensi, dengan indikator persentase ASN yang mengisi jabatan sesuai standar kompetensi;
3. Meningkatnya disiplin aparatur sipil negara, dengan indikator yaitu persentase tingkat kedisiplinan ASN;
4. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian, dengan indikator berupa Indeks Kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian;
5. Tersedianya akurasi data kepegawaian, dengan indikator berupa persentase aparatur sipil negara yang datanya akurat;
6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, dengan indikator berupa nilai evaluasi kinerja pemerintah.

Tujuan dan sasaran RENJA BKPSDM Kabupaten Wajo Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 3.2.



TABEL 3.1.
IDENTIFIKASI KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

| NO. | KEBIJAKAN NASIONAL/ PROVINSI | SUMBER | KETERANGAN |
|------------------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| <p>A. 1</p> | <p>Nasional</p> <p>a. Terbitnya beberapa regulasi yang terkait dengan penguatan kapasitas kelembagaan</p> <p>b. Terbitnya beberapa regulasi yang terkait dengan desentralisasi dan otonomi daerah</p> <p>c. Pencapaian tata kelola dalam meningkatkan kualitas dan transparansi proses rekrutmen CPNS melalui penerapan <i>e-announcement</i> dan sistem CAT.</p> <p>d. Pelaksanaan advokasi hukum dalam rangka penguatan penyelenggaraan pemerintah daerah</p> | <p>Renstra Kementerian Dalam Negeri</p> | <p>Capaian kinerja tahun 2010-2014</p> |
| <p>2</p> | <p>a. Pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik yang diwujudkan dengan penurunan tingkat korupsi, perbaikan pelayanan publik, dan peningkatan akuntabilitas pemerintah</p> <p>b. Pelaksanaan reformasi birokrasi</p> <p>c. Pencapaian prioritas kementerian melalui perumusan kebijakan dibidang PAN dan RB, penataan aparatur yang kompeten dan kompetitif, penerapan kebijakan promosi terbuka, penerapan standar kinerja individu, dan penetapan jabatan fungsional baru</p> <p>d. Pemerintah yang terbuka dan melayani melalui efektivitas pelaksanaan RB, kategori baik pada pelayanan publik, dan perolehan skor indeks kepuasan masyarakat (IKM)</p> <p>e. Aparatur yang bersih, bebas KKN dan akuntabel yang terindikasi melalui peningkatan nilai rata-rata indeks integritas, penurunan pelanggaran disiplin dan etika PNS, dan peningkatan skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI)</p> | <p>Renstra Kementerian PANRB</p> | <p>Capaian kinerja tahun 2010-2014</p> |
| <p>3</p> | <p>a. Penataan PNS dengan fasilitasi IP untuk melakukan penghitungan jumlah kebutuhan PNS yang tepat berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan , serta pendistribusian pegawai dan penyusunan proyeksi kebutuhan PNS selama 5 tahun</p> <p>b. Pembangunan dan pengembangan sistem rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi dengan CAT, serta penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) pada instansi pusat dan daerah</p> <p>c. Peningkatan mutu pelayanan kepegawaian melalui penerapan standar manajemen mutu ISO 9001-2008 dan SAPK online yang terintegrasi</p> | <p>Renstra BKN</p> | <p>Capaian kinerja tahun 2010-2014</p> |



| NO. | KEBIJAKAN NASIONAL/ PROVINSI | SUMBER | KETERANGAN |
|-----------|---|--|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | <p>d. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi melalui penerapan SAPK dan digitalisasi tata naskah kepegawaian dengan <i>Document Management System (DMS)</i></p> <p>e. Perumusan kebijakan pengawasan dan pengendalian, serta pelaksanaan tindakan korektif terhadap pelanggaran peraturan kepegawaian dan sosialisasi /bimbingan teknis peraturan perundang-undangan kepada seluruh IP</p> | | |
| B. | Provinsi | | |
| 1 | Kontribusi dalam pelaksanaan manajemen ASN yang transparan dan akuntabel | Renstra BKD Provinsi Sulawesi Selatan | Capaian kinerja tahun 2008-2013 |
| 2 | <p>a. Pelaksanaan kegiatan diklat struktural, teknis dan fungsional</p> <p>b. Fasilitasi penyelenggaraan diklat pada kabupaten/kota se Sulawesi Selatan</p> | Renstra Badan Diklat Provinsi Sulawesi Selatan | Capaian kinerja tahun 2008-2012 |



Tabel 3.2.
TUJUAN DAN SASARAN

| NO. | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET KINERJA SASARAN 2019 |
|------------|--|--|---|---------------|------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (9) |
| 1. | Terpenuhinya penempatan aparatur sipil negara dalam jabatan sesuai dengan kompetensi (T.1) | Peningkatan kompetensi aparatur sipil negara (S.1) | Persentase ASN yang meningkat kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan (IS.1) | Persen | 100 |
| | | Tersedianya aparatur sipil negara yang memenuhi standar kompetensi (S.2) | Persentase ASN yang mengisi jabatan sesuai standar kompetensi (IS.2) | Persen | 85 |
| 2. | Terpenuhinya Hak dan Kewajiban aparatur sipil negara secara cepat, tepat dan akurat (T.2) | Meningkatnya disiplin aparatur sipil negara (S.3) | Persentase tingkat kedisiplinan ASN (IS.3) | Persen | 100 |
| | | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian (S.4) | Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian (IS.4) | Angka | 90,52 |
| | | Tersedianya akurasi data kepegawaian (S.5) | Persentase aparatur sipil negara yang datanya akurat (IS.5) | Persen | 100 |
| 3 | Peningkatan akuntabilitas kinerja SKPD (T.3) | Meningkatnya akuntabilitas kinerja (S.6) | Nilai evaluasi kinerja pemerintah (IS.6) | Angka | 85 |



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh BKPSDM Kabupaten Wajo, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Wajo untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Sedangkan kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh BKPSDM Kabupaten Wajo sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Perumusan program dan kegiatan BKPSDM Kabupaten Wajo Tahun 2019 berdasarkan pada prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2019, dengan mempertimbangkan tingkat urgensi dan relevansinya dalam memecahkan isu-isu yang terkait dengan tugas dan fungsi BKPSDM Kabupaten Wajo dalam pembangunan daerah. Program dan kegiatan Tahun 2019 merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan menurut rancangan RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional dan kebijakan provinsi. Adapun rencana program dan kegiatan BKPSDM Kabupaten Wajo Tahun 2019 terdiri atas 6 program dan 40 kegiatan (*lihat* Tabel 4.1).

4.2. Sumber Pendanaan

Pendanaan program dan kegiatan BKPSDM Kabupaten Wajo bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2019. Kebutuhan pendanaan BKPSDM Kabupaten Wajo pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 5.381.200.000,- (Lima milyar tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), berdasarkan Lampiran Surat Sekretaris Daerah Nomor: 050/354/Bappeda tanggal 16 Agustus 2018 mengenai Pagu Anggaran Organisasi Perangkat Daerah KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Kabupaten Wajo.



Tabel 4.1.
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN WAJO

Nama OPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM KAB. WAJO

| KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | RENCANA TAHUN 2019 | | | | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020 | | | | | |
|------|---|-------------------|---|--|--|--|--|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------|--|-----------|----------------------|
| | | | LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | |
| 4 | | | URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG | | | | | | | | | | |
| 4 | 05 | | KEPEGAWAIAN | | | | | | | | | | |
| 4 | 05 | 08 | | | | | | | | | | | |
| | | | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | Persentase ASN yang meningkat kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan (Persen) | | 100 | 1.019.510.200 | | 100 | 1.019.510.200 | | | |
| 4 | 05 | 08 | 05 | 14 | Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi Calon PNS Daerah | Jumlah CPNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan dengan predikat BAIK | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | 100 Orang | 435.230.000 | APBD | | 100 Orang | 435.230.000 |
| 4 | 05 | 08 | 05 | 15 | Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah | Jumlah PNS Daerah yang telah mengikuti Diklat PIM II dengan predikat BAIK | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | 4 Orang | 121.044.000 | APBD | | 4 Orang | 121.044.000 |
| | | | | | Jumlah PNS Daerah yang telah mengikuti Diklat PIM III dengan predikat BAIK | 0 | | 0 | | | | | |
| | | | | | Jumlah PNS Daerah yang telah mengikuti Diklat PIM IV dengan predikat BAIK | 0 | | 0 | | | | | |
| 4 | 05 | 08 | 05 | 17 | Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah | Jumlah PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional dengan predikat Baik | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | 17 | 162.500.000 | APBD | | 17 | 162.500.000 |
| 4 | 05 | 08 | 05 | 1 | Pendidikan formal | Jumlah ASN yang menempuh pendidikan formal | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | 1 Orang | 20.000.000 | APBD | | 1 Orang | 20.000.000 |
| 4 | 05 | 08 | 05 | 3 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Jumlah PNS yang telah mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | 50 Orang | 280.736.200 | APBD | | 50 Orang | 280.736.200 |
| 4 | 05 | 08 | 07 | | Program pembinaan dan pengembangan aparatur | Persentase ASN yang mengisi jabatan sesuai standar kompetensi (Persen) | | 85 | 1.289.131.500 | | | 85 | 1.289.131.500 |
| 4 | 05 | 08 | 07 | 11 | Analisis kebutuhan diklat, monitoring dan evaluasi hasil diklat | Jumlah dokumen analisis kebutuhan diklat, monitoring dan evaluasi hasil diklat | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | 2 Dokumen | 126.260.000 | APBD | | 2 Dokumen | 126.260.000 |



| KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | RENCANA TAHUN 2019 | | | | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020 | | | | | |
|------|---|-------------------|--------------------|------------------------|---|--|--|-----------------------------------|-------------------------------|------|--|-------------|--------------------|
| | | | LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | |
| 4 | 05 | 08 | 07 | 02 | Seleksi penerimaan CPNS | Jumlah peserta yang lulus dalam seleksi penerimaan Calon PNS | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | 100 Orang | 400.000.000 | APBD | | 100 Orang | 400.000.000 |
| 4 | 05 | 08 | 07 | 04 | Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat PNS | Jumlah PNS yang menerima SK kenaikan pangkat tepat waktu | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | 1084 Orang | 268.190.000 | APBD | | 1084 Orang | 268.190.000 |
| | | | | | Jumlah PNS yang menerima kenaikan gaji berkala tepat waktu | 222 Orang | | 222 Orang | | | | | |
| 4 | 05 | 08 | 07 | 10 | Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan ujian dinas | Jumlah PNS yang lulus ujian dinas | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | 5 Orang | 29.400.000 | APBD | | 5 Orang | 29.400.000 |
| | | | | | Jumlah PNS yang lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah | 50 Orang | | 50 Orang | | | | | |
| 4 | 05 | 08 | 07 | 17 | Seleksi promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas | Jumlah penyelenggaraan seleksi promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | 1 Kali | 374.974.000 | APBD | | 1 Kali | 374.974.000 |
| | | | | | Penempatan jabatan pelaksana dan jabatan fungsional | Jumlah penempatan jabatan pelaksana dan jabatan fungsional | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | 600 SK | 55.407.500 | APBD | | 600 SK | 55.407.500 |
| 4 | 05 | 08 | 07 | 03 | Pengambilan sumpah jabatan/pelantikan pejabat JPT, administrator dan pengawas | Jumlah pengambilan sumpah jabatan/ pelantikan pejabat JPT, administrator dan pengawas | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | 4 Kali | 34.900.000 | APBD | | 4 Kali | 34.900.000 |
| 4 | 05 | 08 | 07 | | Program pembinaan dan pengembangan aparatur | Persentase tingkat kedisiplinan ASN (Persen) | | 100 | 750.798.000 | | | 100 | 750.798.000 |
| 4 | 05 | 08 | 07 | 12 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan kehadiran PNS | Jumlah PNS yang memperoleh monitoring dan evaluasi penegakan disiplin | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | 6.146 Orang | 17.500.000 | APBD | | 6.146 Orang | 17.500.000 |
| 4 | 05 | 08 | 07 | 13 | Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja PNS | Jumlah PNS yang memperoleh monitoring dan evaluasi pelaporan kinerja | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | 6.146 Orang | 127.000.000 | APBD | | 6.146 Orang | 127.000.000 |
| 4 | 0 | 08 | 07 | 21 | Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai berbasis e-Kinerja | Jumlah ASN yang telah menyusun Sasaran Kerja Pegawai berbasis e-Kinerja tepat waktu | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | 6.146 Orang | 30.000.000 | APBD | | 6.146 Orang | 30.000.000 |
| 4 | 05 | 08 | 07 | 9 | Asistensi dan evaluasi penyelesaian LP2P | Jumlah ASN yang telah menyelesaikan LP2P tepat waktu | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | 5246 Orang | 92.400.000 | APBD | | 5246 Orang | 92.400.000 |



| KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | RENCANA TAHUN 2019 | | | | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020 | | | | | |
|----------|---|-------------------|--------------------|------------------------|--|---|--|------------------------------------|-------------------------------|------|--|------------------------------------|----------------------|
| | | | LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | |
| 4 | 05 | 08 | 07 | 18 | Asistensi, monitoring dan evaluasi penyelesaian LHKPN dan LHKASN | Jumlah ASN yang telah melaporkan LHKPN tepat waktu Jumlah ASN yang telah melaporkan LHKASN tepat waktu | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | 132 Orang 270 Orang | 68.240.000 | APBD | | 132 Orang 270 Orang | 68.240.000 |
| 4 | 05 | 07 | 08 | 14 | Penyelenggaraan sidang Majelis Pertimbangan Kepegawaian | Jumlah PNS yang menjalani sidang Majelis Pertimbangan Kepegawaian | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | 2 Orang | 8.000.000 | APBD | | 2 Orang | 8.000.000 |
| 4 | 05 | 07 | 08 | 19 | Pemberian penghargaan dan pelepasan Pensiun PNS | Jumlah PNS yang menerima Kartu Peserta Taspen tepat waktu Jumlah PNS yang memperoleh hak pensiun tepat waktu Jumlah Pensiun PNS yang menerima penghargaan dan pelepasan pensiun | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | 50 Orang 180 Orang 179 Orang | 343.450.000 | APBD | | 50 Orang 180 Orang 179 Orang | 343.450.000 |
| 4 | 05 | 08 | 07 | 05 | Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi | Jumlah PNS berprestasi yang memperoleh penghargaan | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | 400 Orang | 64.208.000 | APBD | | 400 Orang | 64.208.000 |
| 4 | 05 | 08 | 01 | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (Persen) | | 100 | 1.838.805.300 | | | 100 | 1.838.805.300 |
| 4 | 05 | 08 | 01 | 01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Waktu penyediaan jasa surat menyurat | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | 12 Bulan | 220.700.000 | APBD | | 12 Bulan | 220.700.000 |
| 4 | 05 | 08 | 02 | 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | 12 Bulan | 557.515.300 | APBD | | 12 Bulan | 557.515.300 |
| 4 | 05 | 08 | 06 | 06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Waktu penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | 12 Bulan | 10.000.000 | APBD | | 12 Bulan | 10.000.000 |
| 4 | 05 | 08 | 07 | 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | 12 Bulan | 62.640.000 | APBD | | 12 Bulan | 62.640.000 |
| 4 | 05 | 08 | 08 | 08 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | 12 Bulan | 17.000.000 | APBD | | 12 Bulan | 17.000.000 |



| KODE | | | | | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | RENCANA TAHUN 2019 | | | | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020 | |
|------|----|----|----|----|--|--|--|--|-------------------------------|-------------|-----------------|--|-------------------------------|
| | | | | | | | LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4 | 05 | 08 | 09 | 09 | Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | Waktu penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | 12 Bulan | 42.200.000 | APBD | | 12 Bulan | 42.200.000 |
| 4 | 05 | 08 | 12 | 12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | 12 Bulan | 20.000.000 | APBD | | 12 Bulan | 20.000.000 |
| 4 | 05 | 08 | 15 | 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | 12 Bulan | 15.000.000 | APBD | | 12 Bulan | 15.000.000 |
| 4 | 05 | 08 | 18 | 18 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Waktu penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | 12 Bulan | 683.110.000 | APBD | | 12 Bulan | 683.110.000 |
| 4 | 05 | 08 | 22 | 22 | Penyediaan jasa administrasi kepegawaian | Waktu penyediaan jasa administrasi kepegawaian | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | 12 Bulan | 210.640.000 | APBD | | 12 Bulan | 210.640.000 |
| 4 | 05 | 08 | 02 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur (Persen) | | 100 | 120.000.000 | | | 100 | 120.000.000 |
| 4 | 05 | 08 | 02 | 10 | Pengadaan meubeleur | Jumlah pengadaan meubeleur | | 0 Unit Meja kerja 50 Unit Kursi kerja | 20.000.000 | APBD | | 0 Unit Meja kerja 50 Unit Kursi kerja | 20.000.000 |
| 4 | 05 | 08 | 02 | 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | 1 Gedung | 25.000.000 | APBD | | 1 Gedung | 25.000.000 |
| 4 | 05 | 08 | 02 | 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan/ dinas operasional | Waktu pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | 12 Bulan | 75.000.000 | APBD | | 12 Bulan | 75.000.000 |
| 4 | 05 | 08 | 02 | 0 | Rehabilitasi Sedang/ berat gedung kantor | Jumlah ruang kantor yang direhabilitasi | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | 2 Ruangan | - | APBD | | 2 Ruangan | - |
| 4 | 05 | 08 | 08 | | Program penataan sistem informasi manajemen | Persentase ASN yang datanya akurat | | 100 | 336.380.000 | | | 100 | 336.380.000 |
| 4 | 05 | 08 | 08 | 01 | Pembangunan/ pengembangan SIMPEG/ SAPK | Jumlah pembangunan/ pengembangan SIMPEG/SAPK Waktu pengelolaan dan pemeliharaan dokumen dan arsip | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | 2 Aplikasi 12 Bulan | | APBD | | 2 Aplikasi 12 Bulan | 260.500.000 |



| KODE | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | RENCANA TAHUN 2019 | | | | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020 | | |
|------|---|--|---|---|--|-------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | | LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | Jumlah ASN yang memperoleh Kartu pegawai tepat waktu | | 75 Orang | | | | 75 Orang | | |
| | | Jumlah ASN yang memperoleh Karis/Karsu tepat waktu | | 70 Orang | | | | 70 Orang | | |
| 4 | 05 08 08 | 2 | Penyusunan formasi dan pengolahan e-formasi ASN | Jumlah dokumen penyusunan formasi dan pengolahan e-formasi ASN | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | 1 Dokumen | 75.880.000 | APBD | 1 Dokumen | 75.880.000 |
| 4 | 05 08 26 | | Program Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan | Penilaian LAKIP oleh Inspektorat | | 85 | 26.575.000 | | 85 | 26.575.000 |
| | | | | Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan | | 100 | | | 100 | |
| | | | | Persentase temuan pengelolaan keuangan oleh Inspektorat/BPK yang ditindaklanjuti | | 100 | | | 100 | |
| 4 | 05 08 26 | 01 | Penyusunan Renja SKPD | Jumlah dokumen RKPD yang disusun | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | 2 Dokumen | 5.925.000 | APBD | 2 Dokumen | 5.925.000 |
| 4 | 05 08 26 | 02 | Penyusunan LAKIP SKPD | Jumlah dokumen LAKIP yang disusun | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | 1 Laporan | 6.750.000 | APBD | 1 Laporan | 6.750.000 |
| 4 | 05 08 26 | 03 | Penyusunan Renstra/ Revisi Renstra SKPD | Jumlah dokumen Renstra/ Revisi Renstra SKPD | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | 1 Dokumen | 7.000.000 | APBD | 1 Dokumen | 7.000.000 |
| 4 | 05 08 26 | 05 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun | BKPSDM, Jl. Kejaksaan No. 5B Sengkang Kel. Bulu Pabbulu Kec. Tempe | 1 Laporan | 6.900.000 | APBD | 1 Laporan | 6.900.000 |
| | | | | | TOTAL | | 5.381.200.000 | | | 5.381.200.000 |



BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan Penting

Dokumen Renja ini merupakan dokumen perencanaan organisasi untuk periode satu tahun yang disusun dengan berpedoman pada Revisi Rencana Strategis BKPSDM Kabupaten Wajo Tahun 2014-2019. Dokumen renja ini juga mengacu pada RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2019 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo. BKPSDM Kabupaten Wajo berupaya secara optimal untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Wajo.

Dokumen Renja ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan BKPSDM Kabupaten Wajo dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang ada serta tetap berorientasi pada tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan. Muatan informasi dalam dokumen ini berupa sasaran, indikator kinerja serta rencana capaian dari program dan kegiatan menjadi tolok ukur dalam sistem akuntabilitas kinerja. Dengan demikian, maka diharapkan tugas pokok dan fungsi BKPSDM Kabupaten Wajo dalam bidang kepegawaian dapat terlaksana dengan mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

BKPSDM Kabupaten Wajo dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan memperhatikan beberapa kaidah dalam pelaksanaan program dan kegiatan, antara lain :

- a. BKPSDM Kabupaten Wajo berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Dokumen Renja Tahun 2019 serta diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2019.
- b. BKPSDM Kabupaten Wajo berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BKPSDM Kabupaten Wajo Tahun 2019 dengan berpedoman kepada Renja BKPSDM Kabupaten Wajo Tahun 2019 dan RKPD Kabupaten Wajo Tahun 2019, termasuk diantaranya Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Wajo Tahun 2019.
- c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Kabupaten Wajo Tahun 2019, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2019.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Renja BKPSDM Kabupaten Wajo Tahun 2019 selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2019 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja BKPSDM Kabupaten Wajo. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja BKPSDM



Tahun 2019 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/ pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Renja BKPSDM Kabupaten Wajo juga memberikan umpan balik (*feedback*) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik. Semoga keberadaan Renja BKPSDM Kabupaten Wajo ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi dan misi BKPSDM Kabupaten Wajo serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kabupaten Wajo.

Sengkang, 4 Desember 2018



Pt. Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia

H. AMIRUDDIN A., S.Sos., M.M.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19730514199303100

